



**PENGARUH PENERAPAN IAS 39 (TENTANG INSTRUMEN
KEUANGAN: PENGAKUAN, DAN PENGUKURAN)
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN:
PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

TESIS

Oleh :

GARDINA AULIN NUHA

NIM: 140820301018

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PENGARUH PENERAPAN IAS 39 (TENTANG INSTRUMEN
KEUANGAN: PENGAKUAN, DAN PENGUKURAN) TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN:
PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

TESIS

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Magister Akuntansi (S2)

Oleh :

GARDINA AULIN NUHA

NIM : 140820301018

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengaruh Penerapan LAR 39 (Tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan, Dan Pengukuran) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Oktober 2016

Tempat : Gedung Pascasarjana Universitas Jember

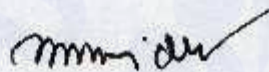
Tim Penguji
Ketua



Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak.
NIP. 196608051992012001

Anggota 1

Anggota 2



Dr. Muhammad Miqdad, MM., Ak
NIP. 197107271995121001



Dr. Agung Budi Sulistiyono, M.Si, Ak.
NIP. 197809272001121002

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak.
NIP. 196608051992012001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Muhammad Miqdad, MM., Ak
NIP. 197107271995121001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : GARDINA AULIN NUHA
NIM : 140820301018
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Judul Tesis : PENGARUH PENERAPAN IAS 39 (TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN, DAN PENGUKURAN) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN: PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Apabila ternyata di kemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau perjiplakan, maka saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 28 Oktober 2016

Yang menyatakan,


GARDINA AULIN NUHA

NTM. 140820301018

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal: 28 Oktober 2016

Oleh

Pembimbing Utama



Dr. Yosefa Sayekti M.Com, Ak.
NIP. 196408091990032001

Pembimbing Anggota



Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak
NIP. 197204162001121001

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Akuntansi
Ketua Program Studi



Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak.
NIP. 196608051992012001

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Orangtuaku tercinta, Yulinartati dan Sukisworo, terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga tesis ini selesai;
2. Bapak Juraini dan Ibu Siti Asiyah, terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga tesis ini selesai;
3. Fachmi Behesti, terimakasih selama ini selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Adik-adikku tersayang, Dini Rosa Aprilia, Clara Okta Kiswara dan Fachma Uchriza, yang selalu menghibur dan menyemangati dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja
(QS. Ash Shaaffaat (37) :61)

Miracle is another name for hard work
(Kang Tae Joon- To The Beautiful You)

Whatever will be, will be, the future not ours to see,
que sera sera, what will be, will be
(Jay Livingston and Ray Evans- Que Sera sera)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *IAS 39* (tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan: perbandingan Indonesia dan Malaysia. Pengujian dilakukan dengan membandingkan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39* pada perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia. Pengujian lanjutan dilakukan secara terpisah untuk Indonesia dan Malaysia. Sampel yang digunakan dalam pengujian pertama sebanyak 96 *firm-years* selama periode 2008-2011. Pengujian kedua menggunakan sampel 71 *firm-years* perusahaan perbankan di Indonesia selama periode 2008-2011. Pengujian ketiga menggunakan sampel 25 *firm-years* perusahaan perbankan di Malaysia selama periode 2008-2011. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proxy manajemen laba. Perhitungan *discretionary accruals* menggunakan metode Beaver dan Engel (1996). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis uji beda *Independent Sample T-test*. Penelitian ini tidak berhasil menolak H_0 untuk ketiga pengujian. Penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* di perusahaan perbankan. Penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) di perusahaan perbankan Malaysia.

Kata Kunci : *IAS 39*, Manajemen Laba, *Discretionary Accruals*.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of IAS 39 implementation (financial instruments: recognition and measurement) on earning management in banking companies: comparison between Indonesia and Malaysia. This research examine by comparing the earnings management before and after implementing IAS 39. The further examination doing separately between Indonesia and Malaysia. The samples that used in the first examination is 96 firm-years during 2008-2011 which is Indonesia and Malaysia's banking companies. The samples that used in second examination is 71 firm-years during 2008-2011 which is Indonesia's banking companies. For the third examination, the samples that used is 25 firm-years during 2008-2011 which is Malaysia's banking companies. Technique of collecting sample is purposive sampling method. This research using discretionary accruals as an earning management's proxy. Discretionary accruals calculated using Beaver and Engel (1996) method. Data analysis' technique in this research is using differentiate test analysis of independent sample T-test. The result of this research failed to resist H0 for three times examination. This research show that earnings management in banking companies after IAS 39 implementation is bigger than or equal to before it.

Key Words : IAS 39, Earnings Management, Discretionary Accruals.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengaruh Penerapan IAS 39 (Tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan, dan Pengukuran) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya.
3. Dr. Yosefa Sayekti M.Com, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menjadi pembimbing saya dan. Terimakasih atas segala kemudahan, kesabaran, serta saran yang telah diberikan.
4. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak.; Dr. Agung Budi Sulistiyo, M.Si, Ak.; Dr. Ahmad Roziq, MM, Ak.; Dr. Whedy Prasetyo, M.SA, Ak.; dan Bapak-Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat selamanya.
6. Kedua Orangtuaku tercinta Yulinartati dan Sukisworo, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam mewujudkan cita-citaku. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka dan kelak menempatkan mereka di surga-Nya.

7. Bapak Juraini dan Ibu Siti Asiyah, terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka dan kelak menempatkan mereka di surga-Nya.
8. Fachmi Behesti, terima kasih atas doa, semangat, serta motivasinya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah ini dengan baik.
9. Adik-adik saya tersayang, Dini Rosa Aprilia, Clara Octa Kiswara, dan Fachma Uchriza. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
10. Keluarga Abdussamad, keluarga cemaraku (Itang, Mbak Resti, Tata, Uuk, dll), terima kasih atas semangat dan dukungannya. Tidak lupa terima kasih untuk penyemangat suasana hatiku “Si Tengil Aira”. Semoga kelak Aira bisa menuntut ilmu yang lebih tinggi dari tante Didot.
11. Teman-teman MAKSI HORE (Mbak Astrid, Mbak Fica, Mbak Nurul, Mbak Anis, Mbak Mia, Mas Wahid, Mas Chandra, Mas Omik, Mas Dana, Pak Munir). Terima kasih sudah membuat kuliah S2 saya menjadi menyenangkan.
12. Teman-teman Magister Akuntansi Akuntansi 2014 terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Tidak lupa terima kasih untuk Mbak Sita yang senantiasa membantu, menyemangati, dan memotivasi sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 07 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Agensi.....	7
2.1.2 Asimetri Informasi	8
2.1.3 Manajemen Laba.....	9
2.1.3.1 Definisi dan Motivasi Manajemen Laba.....	9
2.1.3.2 Pola Manajemen Laba.....	11
2.1.3.3 Teknik Manajemen Laba Akrual	12
2.1.4 <i>International Financial Reporting Standard (IFRS)</i>	13
2.1.5 <i>IFRS</i> di Indonesia.....	16

2.1.6 IFRS di Malaysia.....	17
2.1.7 Instrumen Keuangan dan Manajemen Laba.....	18
2.1.8 Peraturan Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39 di Indonesia	20
2.1.9 Peraturan Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39 di Malaysia.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Pengembangan Hipotesis	27
2.4 Rerangka Konseptual	31
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis dan Sumber Data	33
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.3.1 Definisi Operasional.....	35
3.3.2 Manajemen Laba.....	35
3.4 Metode Analisis Data.....	36
3.4.1 Statistik Deskriptif	36
3.4.2 Pengujian Normalitas	36
3.5 Pengujian Hipotesis.....	37
3.5.1 Uji <i>Independent Sample T-test</i>	37
3.5.2 <i>Mann-Whitney Test</i>	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	39
4.2 Analisis Data	40
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.2.2 Uji Normalitas	44
4.2.3 Uji Hipotesis	45
4.3 Pembahasan Hipotesis.....	51
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59

5.1 Kesimpulan Penelitian	59
5.2 Implikasi Penelitian.....	60
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.4 Saran Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

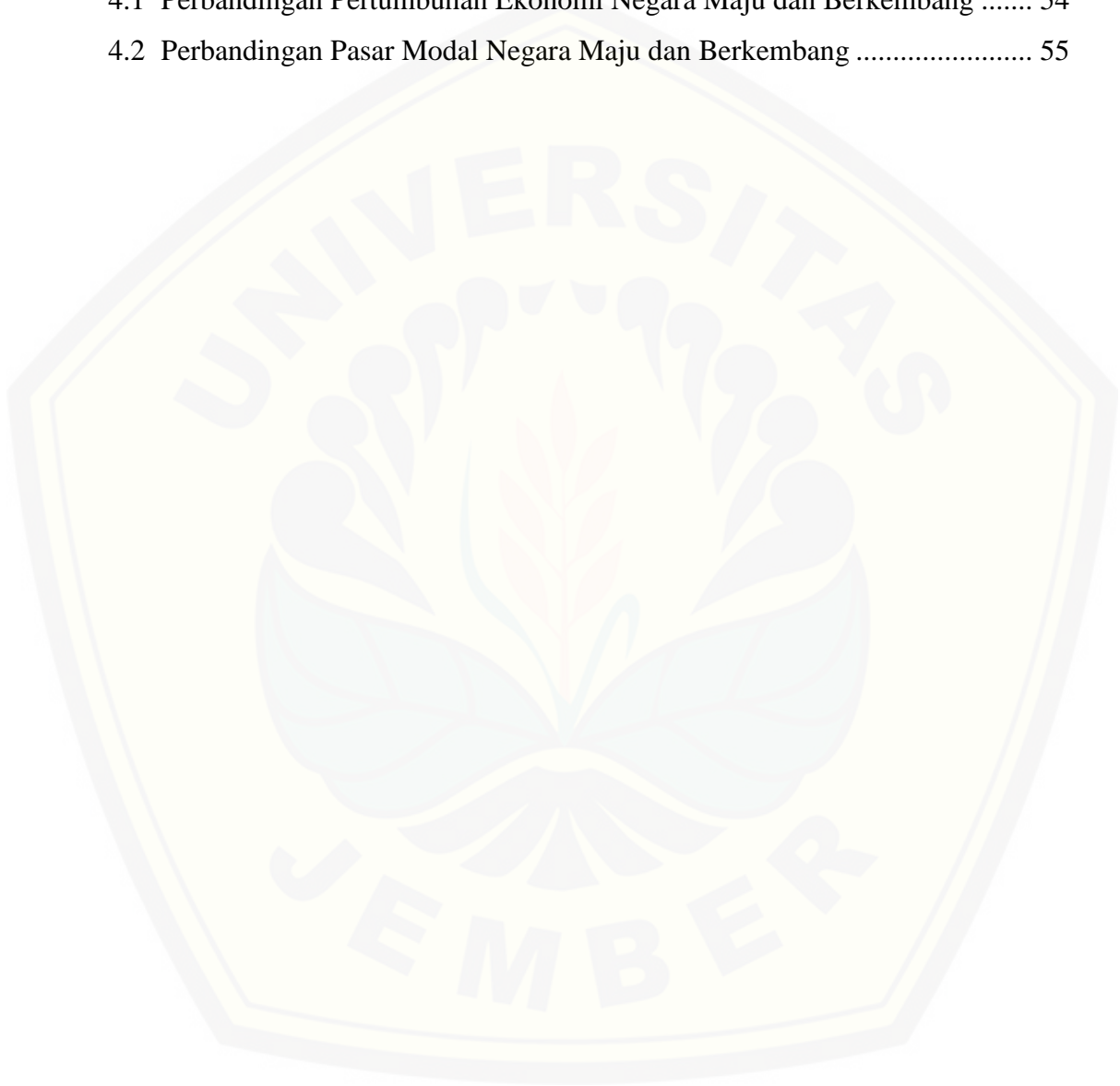


DAFTAR TABEL

2.1	<i>Roadmap</i> Konvergensi <i>IFRS</i> di Indonesia.....	16
2.2	<i>Roadmap</i> Konvergensi <i>IFRS</i> di Malaysia	18
2.3	Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
4.1	Penentuan Kriteria Sampel Penelitian	39
4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Indonesia dan Malaysia.....	41
4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Indonesia.....	42
4.4	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Malaysia.....	43
4.5	Hasil Pengujian Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	44
4.6	Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 1 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	46
4.7	Hasil Pengujian Hipotesis 1 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	46
4.8	Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 2 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	47
4.9	Hasil Pengujian Hipotesis 2 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	48
4.10	Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 3 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	49
4.11	Hasil Pengujian Hipotesis 3 dengan <i>Independent Sample T-test</i>	50
4.12	Perbandingan <i>Mean</i> Indonesia dan Malaysia	57

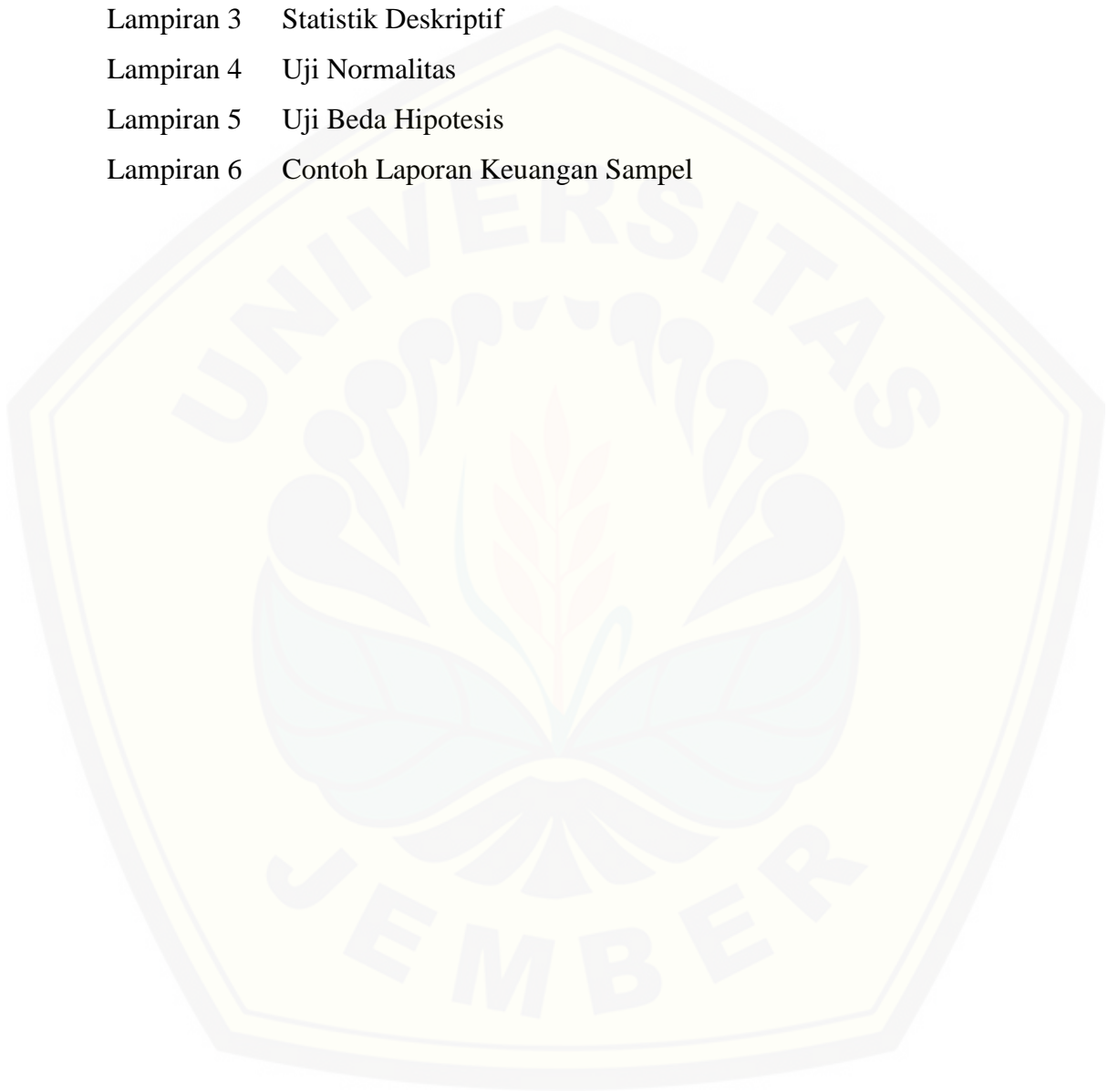
DAFTAR GAMBAR

2.1 Rerangka Konseptual Penelitian	32
4.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang	54
4.2 Perbandingan Pasar Modal Negara Maju dan Berkembang	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sampel Penelitian Hipotesis
- Lampiran 2 *Discretionary Accruals*
- Lampiran 3 Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Uji Normalitas
- Lampiran 5 Uji Beda Hipotesis
- Lampiran 6 Contoh Laporan Keuangan Sampel



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaporan akuntansi oleh entitas bisnis merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan terhadap para *stakeholder*. Informasi akuntansi yang telah disajikan, dalam hal ini laporan keuangan, merupakan salah satu alat yang digunakan oleh *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Selain itu, Gumanti (2000) menambahkan bahwa laba dalam laporan keuangan merupakan target penilaian terkait dengan prestasi suatu departemen (manajer) atau perusahaan secara umum. Sehingga informasi dalam laporan keuangan khususnya laba cenderung diatur agar menghasilkan laba yang sesuai dengan keinginan pihak manajemen (Gumanti, 2000). Perilaku mengatur laba tersebut biasa disebut dengan manajemen laba.

Kassem (2012) menjelaskan bahwa teknik manajemen laba ada yang berupa teknik ilegal (tidak diperbolehkan oleh standar akuntansi) dan ada yang berupa teknik legal (diperbolehkan oleh standar akuntansi). Praktik manajemen laba dengan cara ilegal disebut dengan *fraud* (Kassem, 2012). Beberapa kasus *fraud* atau skandal akuntansi telah terjadi, seperti kasus perusahaan Enron. Di Indonesia sendiri skandal akuntansi dilakukan oleh perusahaan Kaltim Prima Coal. Di Malaysia, skandal akuntansi terjadi pada perusahaan Transmile Group. Namun secara legal, manajemen laba tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan celah dari standar akuntansi keuangan (Kassem, 2012). Cara legal ini dilakukan dengan mengubah metode akuntansi, membuat estimasi akuntansi, mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya, mereklasifikasi akun *current* dan *non-current*, serta mereklasifikasi akrual diskrisioner dan akrual non diskrisioner (Wolk dkk, 2006).

Manajemen laba dapat dilakukan secara legal. Namun, menurut Sulistyanto (2008:12) hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah fungsi laporan keuangan yang bersifat relevan, netral, komprehensif, serta memiliki daya banding dan daya uji. Dampaknya *stakeholder* tidak memperoleh informasi yang

valid dan dapat mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil oleh *stakeholder* tersebut (Sulistyanto, 2008:19). Para *stakeholder* jelas menginginkan laporan keuangan yang relevan serta tidak mengandung bias. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar akuntansi yang mampu meminimalisir celah-celah yang ada, agar dapat membatasi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, angin segar terkait dengan standar akuntansi yang berkualitas mulai menggemakan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan standar akuntansi keuangan ke arah *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. *International Financial Reporting Standard (IFRS)* merupakan seperangkat standar akuntansi yang dibentuk oleh *International Accounting Standards Committee (IASC)* dan *International Accounting Standards Board (IASB)* (Widiyanti, 2012). Penerapan *IFRS* awalnya diwajibkan penggunaannya oleh negara Uni Eropa pada tahun 2005 (Qomariah dan Marsono, 2013). Namun dengan adanya globalisasi, maka diperlukan suatu laporan keuangan yang seragam sehingga banyak negara-negara lain yang menyusul menggunakan standar akuntansi *IFRS*. Penerapan standar akuntansi *IFRS* diharapkan menjadi standar penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari sebuah entitas.

Penerapan standar akuntansi *IFRS* dianggap dapat berpengaruh dalam mengurangi praktik manajemen laba akibat *principles based* yang diterapkan oleh *IFRS*. *Principles-based* merupakan standar yang bersifat prinsip tanpa mengatur prosedur dan kebijakan secara detail. Lebih lanjut lagi, dengan adanya *principles based* maka aturan terkait akuntansi dapat dipersempit sehingga dapat menurunkan adanya celah pelanggaran (Cahyati, 2011). Penelitian oleh Webster dan Thornton (2005) melakukan pengujian yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan standar akuntansi *principles based* (Bursa Efek Kanada) memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan standar akuntansi *rule based* (Bursa Efek Amerika). Oleh karena itu, *IFRS* menjadi standar yang diharapkan mampu meminimalisir praktik manajemen laba.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cai dan Courtenay (2008) yang menjelaskan bahwa *IFRS* sebagai standar internasional bertujuan untuk

menyederhanakan berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dan diharapkan untuk membatasi pertimbangan kebijakan manajemen (*management's discretion*) terhadap manajemen laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Lebih lanjut lagi, Lestari (2013) menyatakan bahwa manfaat terpenting *IFRS* dari sudut pandang akuntansi adalah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatnya komparabilitas laporan keuangan (relevan), dan transparansi sesuai dengan bukti yang ada (*reliable*). Salah satunya mengurangi adanya peluang yang memungkinkan munculnya manajemen laba di setiap pelaporan keuangan.

Pemikiran atas keterkaitan antara penerapan *IFRS* dan manajemen laba, memotivasi dilakukannya penelitian mengenai hal tersebut. Namun, sampai sejauh ini penelitian mengenai penerapan *IFRS* dan manajemen laba masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Hasil penelitian oleh Sellami dan Fakhfakh (2013) melaporkan bahwa terdapat indikasi adanya penurunan manajemen laba dengan diskresioneri akrual selama enam tahun setelah penerapan *IFRS* secara mandatori sehingga hasil kesimpulan menunjukkan adanya pengaruh negatif antara penerapan *IFRS* dengan manajemen laba. Hal tersebut sejalan pula dengan penelitian Barth dkk (2007), Anggraita (2012), Rohaeni dan Aryati (2012), Qomariah dan Marsono (2012), dan Nurazmi dkk (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari penerapan *IFRS* terhadap manajemen laba. Penelitian Narendra dan Haryanto (2013) menunjukkan bahwa dengan adanya *IFRS* meningkatkan manajemen laba oleh perusahaan sehingga menunjukkan pengaruh positif terkait praktik *IFRS* dan manajemen laba.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Santi dan Pontoh (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara *IFRS* dengan manajemen laba. Pengujian tingkat perbedaan juga menunjukkan tidak adanya perbedaan tingkat manajemen laba antara sebelum dan sesudah penerapan *IFRS*. Lebih lanjut lagi, penelitian oleh Houqe dkk (2011) menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh antara penerapan *IFRS* dan manajemen laba. Hasil penelitian Rudra dan Bhattacharjee (2011) juga memberikan kesimpulan tidak adanya pengaruh antara praktik *IFRS* dan manajemen laba. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita

ketahui bahwa hasil penelitian belum konsisten sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait penerapan *IFRS* dan manajemen laba.

Saat ini, kita telah memasuki era *Asean Economic Community* dimana negara-negara memiliki peluang secara lebar dalam hal perdagangan, investasi, serta terkait lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, arah penelitian (dalam hal ini akuntansi) juga perlu melebarkan obyek penelitian agar dapat digeneralisasi lebih luas. Penelitian ini menggunakan obyek dari beberapa negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia.

Indonesia mengumumkan konvergensi *IFRS* tahun 2008 dan pelaksanaan *IFRS* secara *full* di Indonesia pada tahun 2012 (Martani dkk, 2012:15). Malaysia mengumumkan konvergensi *IFRS* tahun 2008 dan pelaksanaan *IFRS* secara penuh di Malaysia pada tahun 2012 (Hanefah, 2012). Indonesia dan Malaysia memiliki periode tahun yang sama untuk konvergensi dan pelaksanaan *IFRS* secara penuh, sehingga manajemen laba kedua negara tersebut dapat dibandingkan atas dasar kesamaan dalam periode penerapan .

Penelitian ini berfokus pada praktik *IFRS* terkait instrumen keuangan yaitu *IAS 39: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran (Revisi 2014)*. Fokus terhadap *IAS 39* dikarenakan aturan dalam *IAS 39* terkait reklasifikasi dan penentuan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dianggap mampu menurunkan manajemen laba. Lebih lanjut lagi, penelitian ini dilakukan melalui pengujian perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi *IAS 39* (Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran). Obyek penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan. Hal tersebut karena laporan keuangan pada perusahaan perbankan mengandung instrumen keuangan yang lebih signifikan daripada perusahaan non perbankan, sehingga lebih tepat jika menggunakan sampel perusahaan perbankan (Saputra, 2013). Selain itu, pemilihan obyek perbankan karena sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Santy dan Pontoh (2012), dimana masih sedikit penelitian terdahulu yang mengeksplorasi pengaruh penerapan *IFRS* dengan manajemen laba pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menguji pengaruh penerapan *IAS 39* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan: perbandingan

Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, *IAS 39* diadopsi pada *PSAK 55* (revisi 2014) dan di Malaysia, *IAS 39* diadopsi pada *MFRS 139* (revisi 2014).

1.2 Perumusan masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* di perusahaan perbankan?
- b. Apakah manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (*PSAK 55*) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (*PSAK 55*) di perusahaan perbankan Indonesia?
- c. Apakah manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) di perusahaan perbankan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis mengecilnya manajemen laba antara sebelum penerapan *IAS 39* dengan sesudah penerapan *IAS 39* pada perusahaan perbankan.
- b. Untuk menguji dan menganalisis mengecilnya manajemen laba antara sebelum penerapan *IAS 39* (*PSAK 55*) dengan sesudah penerapan *IAS 39* (*PSAK 55*) pada perusahaan perbankan di Indonesia.
- c. Untuk menguji dan menganalisis mengecilnya manajemen laba antara sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) dengan sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) pada perusahaan perbankan di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pengembangan teori sebagai bahan kajian terkait dampak penerapan *IAS 39* terhadap manajemen laba di Indonesia dan Malaysia.
- b. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan terkait dampak penerapan *IAS 39* pada kualitas laba perusahaan.
- c. Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi terkait penggunaan standar *IAS 39* dan dampaknya terhadap kualitas laba perusahaan.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai suatu proses pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *IAS 39* terhadap manajemen laba di Indonesia dan Malaysia.
- e. Bagi umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai pengetahuan serta bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih pihak prinsipal dengan pihak agen, dimana prinsipal memberikan delegasi wewenang pengambilan keputusan kepada pihak agen. Setiap pihak dalam hubungan keagenan memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan hak yang patut diterima. Pihak prinsipal berkewajiban untuk mengawasi, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban dari pihak agen terkait pengelolaannya serta memberikan perhatian dan penghargaan yang layak kepada pihak agen atas kinerja positif yang dilakukan (Sulistyanto, 2008:29). Pihak prinsipal juga berhak untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang disalurkan, serta mengganti pihak agen bila dirasa pihak agen tidak mampu bekerja sesuai tujuan perusahaan (Sulistyanto, 2008:29).

Sebaliknya, pihak agen berkewajiban mengoperasikan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemilik secara transparan (Sulistyanto, 2008:29-30). Lebih lanjut lagi, Sulistyanto (2008:30) menjelaskan bahwa, pihak agen juga harus mau menerima pengawasan dan pengarahan dari pihak prinsipal terkait pengelolaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan bila pihak agen mendapat pengawasan dan pengarahan yang tidak sesuai tujuan maka pihak agen memiliki hak untuk menolak. Selain itu, pihak agen juga memiliki hak dalam hal mendapatkan penghargaan dari pihak prinsipal terkait kinerja yang melampaui target (Sulistyanto, 2008:30).

Hubungan antara agen dan prinsipal yang biasa disebut dengan hubungan keagenan, dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. Hal tersebut ditegaskan oleh Delves dan Patrick (2010) bahwa meskipun agen dan prinsipal

bekerja untuk tujuan yang sama tetapi mereka tidak selalu memiliki kepentingan yang sama sehingga rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan.

Perkembangannya, permasalahan konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara prinsipal dan agentetapi juga permasalahan antara agen dengan *stakeholder* baik itu investor, regulator, kreditur, dan lain-lain. Hal tersebut didukung oleh tiga hipotesis pada teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watts dan Zimmerman (1986). *Bonus plan hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen, *debt (equity) hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara agen dan kreditur, serta *political cost hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara agen dan regulator.

Permasalahan konflik kepentingan tersebut akhirnya mengarah pada manajemen laba yang didukung dengan adanya asimetri informasi. Permasalahan konflik kepentingan dapat di atasi dengan mengeluarkan biaya keagenan. Biaya keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak prinsipal untuk mengamati dan mengawasi tindakan dari agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen dalam hal menjamin bahwa pihak agen akan mengelola perusahaan sesuai dengan pengarahannya pihak prinsipal yang berdasarkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, *residual loss* merupakan pengorbanan pihak prinsipal dengan berkurangnya kesejahteraan prinsipal akibat perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

2.1.2 Asimetri Informasi

Permasalahan yang terjadi dalam kontrak antara agen dengan prinsipal maupun *stakeholder* yang lain, terjadi akibat perbedaan kepentingan antar kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut mengarahkan pihak agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak agen akibat adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antar pihak yang berkepentingan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Scott (2009:13) menjelaskan bahwa

bentuk dari asimetri informasi ada dua tipe yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

Adverse selection merupakan tipe asimetri informasi dimana satu atau lebih pihak memiliki keuntungan informasi atas pihak lain (Scott, 2009:13), dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak terkait keadaan dan prospek perusahaan daripada pihak prinsipal. Tipe asimetri informasi selanjutnya adalah *moral hazard*. *Moral hazard* merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih pihak dapat melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lain (Scott, 2009:14), dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pihak agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya diluar sepengetahuan dari pihak prinsipal. Kemunculan asimetri informasi dalam konflik kepentingan mengarah pada praktik manajemen laba. Manajemen laba merupakan pengaturan laba yang dilakukan oleh pihak agen atau manajemen untuk tujuan tertentu.

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Definisi dan Motivasi Manajemen Laba

Harga pasar saham suatu perusahaan salah satunya dapat dipengaruhi oleh laba. Penampakan laba yang selalu meningkat secara konsisten merupakan pemandangan yang elok bagi manajemen. Namun, Sulistyanto (2008:47) menjelaskan bahwa perusahaan yang labanya selalu naik secara konsisten akan mengakibatkan resiko penurunan laba lebih besar dibandingkan prosentasi kenaikannya. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang pihak manajemen melakukan pengaturan laba. Tindakan manajemen laba sampai saat ini masih menjadi polemik. Hal tersebut dikarenakan beberapa pendapat menyatakan bahwa manajemen laba merupakan hal yang lumrah dan boleh dilakukan karena standar akuntansi memfasilitasi dilakukannya praktik ini. Sebaliknya pihak yang kontra menganggap manajemen laba merupakan tindakan tidak etis yang memanfaatkan metode dan standar akuntansi untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dengan mengotak-atik laba perusahaan.

Akibat polemik dan perbedaan pandangan mengenai manajemen laba, maka hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait dengan definisi manajemen

laba. Perkembangan penelitian mengenai manajemen laba akhirnya memunculkan banyak definisi berbeda. Hal tersebut dikarenakan peneliti memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain. Berikut beberapa definisi manajemen laba oleh peneliti terdahulu.

1. Schipper (1989)

Manajemen laba adalah intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

2. Merchant dan Rockness (1994)

Manajemen laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan agar terbentuk informasi mengenai keuntungan ekonomis (*economic advantage*) yang sebenarnya tidak dialami oleh perusahaan.

3. Fishcer dan Rosenzweig (1995)

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

4. Healy dan Wahlen (1999)

Manajemen laba adalah tindakan manajer dengan menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksinya untuk merubah laporan keuangannya sehingga dapat menyesatkan *stakeholders* dalam menilai kinerja perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka laporan keuangan.

5. Scott (2009)

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas dan atau nilai pasar perusahaan.

6. Febriyanti dkk (2014)

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen atas angka laba sesuai dengan kepentingan manajer dengan memanfaatkan peluang dari SAK yaitu kebebasan untuk memilih metode akuntansi

Berdasarkan pengertian di atas, persamaan yang muncul adalah bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam mengintervensi laba dengan tujuan tertentu. Peluang tersebut muncul dari standar akuntansi keuangan, dalam hal manajemen laba tidak keluar dari lingkup standar akuntansi keuangan dan dianggap sebagai hal yang diperbolehkan.

Tindakan manajer untuk mengintervensi laba disebabkan adanya motivasi-motivasi tertentu. Terdapat tiga hipotesis yang diduga menjadi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986). Hipotesis pertama adalah *bonus plant hypothesis*, dimana manajer termotivasi meningkatkan laba untuk mendapatkan bonus. Hipotesis kedua adalah *debt (equity) hypothesis*, dimana manajer termotivasi mempermainkan laba untuk menunda utang dan piutang. Hipotesis ketiga adalah *political cost hypothesis*, dimana manajer termotivasi memperbesar atau memperkecil laba melalui metode-metode akuntansi untuk melanggar regulasi pemerintah terkait dengan pajak.

2.1.3.2 Pola Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba memiliki pola yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan pihak manajemen. Scott (2009:405) menjelaskan bahwa terdapat empat pola dari manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Taking a bath merupakan pola manajemen laba dengan menurunkan laba di periode sekarang untuk meningkatkan laba pada periode yang akan datang.

2. *Income minimization*

Income minimization hampir sama dengan *taking a bath*, namun pola ini sedikit lebih ekstrim dalam hal menurunkan laba periode berjalan. Penurunan laba biasanya dilakukan untuk tujuan mengecilkan nilai pajak.

3. *Income maximization*

Income maximization merupakan pola manajemen laba dengan mengatur laba menjadi lebih tinggi daripada sebenarnya. Salah satu motivasinya bisa dikarenakan untuk tujuan bonus (*bonus plant hypothesis*)

4. *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan pola manajemen laba dengan mengatur laba agar terlihat konstan atau relatif sama selama beberapa periode.

2.1.3.3 Teknik Manajemen Laba Akrua

Teknik manajemen laba biasanya dilakukan dengan menggunakan komponen akuntansi akrual. Akrua merupakan suatu transaksi yang dilaporkan tanpa perlu ada aliran kas yang masuk atau keluar. Oleh karena itu, komponen ini mudah digunakan untuk mengintervensi laba. Lebih lanjut lagi, penelitian ini menguji manajemen laba untuk teknik akrual. Komponen akrual terdiri dari dua yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi (Sulistyanto, 2008:164). Sedangkan *non discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi (Sulistyanto, 2008:164).

Perkembangan penelitian terkait manajemen laba mendorong munculnya berbagai model empiris guna mengidentifikasi aktivitas manajemen laba. Terdapat tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan (Sulistyanto, 2008:7):

1. Model berbasis akrual

Model ini merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Dimana model ini dikembangkan oleh beberapa peneliti sehingga muncul berbagai model empiris manajemen laba pada jenis ini meliputi *Healy Model*, *DeAngelo Model*, *Jones Model*, *Modified Jones Model*. Perbedaan pada keempat model empiris tersebut pada proksi *discretionary accruals* yang digunakan untuk mengidentifikasi manajemen laba.

2. Model berbasis *specific accruals*

Model ini merupakan pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Dimana model empiris manajemen laba jenis ini adalah *Beaver and Engel model* yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996). Dimana model ini ditujukan untuk industri perbankan.

3. Model *distribution of earnings*

Model ini mengidentifikasi manajemen laba dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen laba untuk mendeteksi faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Dimana model manajemen laba ini dikembangkan oleh De George dkk (1999) dan Myers dan Skinner (1999).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan obyek perusahaan perbankan sehingga model pengujian manajemen laba menggunakan model berbasis *specific accruals* yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996). Model ini dianggap lebih relevan digunakan oleh perbankan karena komponen perhitungan di dalamnya sesuai dengan perusahaan perbankan. Komponen tersebut berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh bank yaitu pinjaman yang dihapuskan, pinjaman yang beredar, aset yang bermasalah (*non performing assets*), selisih *non performing assets* dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Selain itu model Beaver dan Engel telah diuji oleh Rahmawati (2007), dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa model Beaver dan Engel (1996) merupakan model yang paling cocok bila digunakan untuk mengukur manajemen laba di perusahaan perbankan. Penggunaan model Beaver dan Engel (1996) juga digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Santy dan Pontoh (2012), Anggraita (2012) dan Nurazmi dkk (2015).

2.1.4 *International Financial Reporting Standard (IFRS)*

Pada tahun 1973 dibentuk suatu organisasi *International Accounting Standard Committee (IASC)* yang merupakan kesepakatan lembaga akuntansi nasional dari sepuluh negara yaitu Australia, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat (Martani dkk, 2012:18).

Produk yang dihasilkan oleh *IASC* adalah standar akuntansi yang disebut dengan *International Accounting Standards* (*IAS*). Seiring perkembangannya, *IASC* mampu menyusun satu set standar akuntansi komprehensif pada tahun 1995 dan pada tahun 2001, *IASC* berganti nama menjadi *IASB* (*International Accounting Standards Board*) (Martani dkk, 2012: hal, 18). Standar akuntansi yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh *IASC*, diadopsi oleh *IASB* dan diterbitkan kembali dengan nama *IFRS* (Martani dkk, 2012:19).

Martani dkk (2012:19) menjelaskan bahwa *IASB* merupakan organisasi penerus dari *IASC* yang memiliki tujuan untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan diterapkan secara internasional dengan harapan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dibandingkan sehingga membantu proses pengambilan keputusan ekonomi. Lebih lanjut lagi, *IASB* juga memiliki tujuan untuk bekerja sama dengan dewan standar nasional dari berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan *IFRS* sebagai standar akuntansi yang berkualitas.

IFRS telah menjadi standar akuntansi yang banyak digunakan oleh berbagai negara. Pada tahun 2005, Uni Eropa mewajibkan seluruh perusahaan yang *go public* di negara Uni Eropa untuk menggunakan *IFRS* sebagai pedoman standar akuntansi (Qomariah dan Marsono, 2013). Kemudian organisasi G20 pada tahun 2008, juga mewajibkan anggotanya untuk menggunakan *IFRS* sebagai standar akuntansi (Zamzami, 2011).

IFRS sebagai suatu standar internasional memiliki beberapa ciri utama yang membedakan dengan standar lain yaitu (Martani dkk, 2012:16):

1. *Principles- Based*

Penggunaan *principles-based* sebagai standar memiliki ciri pengaturan terhadap hal-hal yang pokok, sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Penggunaan prinsip ini mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

2. Nilai Wajar

Penggunaan nilai wajar digunakan untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Dikatakan relevan karena dapat menunjukkan nilai terkini. *IFRS* membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item seperti aset tetap dan aset tidak berwujud.

3. Pengungkapan

Keharusan lebih banyak dilakukan pengungkapan atas aktifitas perusahaan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan terkait aktifitas perusahaan. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

Lebih lanjut lagi, *IFRS* sebagai standar akuntansi internasional dapat memberikan kontribusi besar dalam hal menciptakan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dan dapat diperbandingkan secara internasional. Menurut Zamzami (2011), secara umum terdapat manfaat dari konvergensi *IFRS* yaitu

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability*).
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global.
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan *earning management*.

Selanjutnya, penelitian ini terfokus pada penerapan standar *IFRS* untuk *IAS 39*. *IAS 39* merupakan standar yang berisi prinsip-prinsip untuk pengakuan dan pengukuran mengenai instrumen keuangan dalam laporan keuangan. *IFRS* mengeluarkan *IAS 39* pada tahun 2003 namun efektif digunakan pada 1 Januari tahun 2005 (NN, www.iasplus.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2016). Hingga saat ini *IAS 39* terus mengalami revisi hingga revisi terakhir di tahun 2014 yaitu *IAS 39* (2014).

2.1.5 IFRS di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan *IFRS*. Penggunaan *IFRS* di Indonesia merupakan suatu komitmen Indonesia sebagai salah satu organisasi G20 (Zamzami, 2011). Pada tanggal 15 November 2008, disebuah forum G20 di Washington DC, menghasilkan kesepakatan bersama terkait konvergensi *IFRS* (Zamzami, 2011). Konvergensi *IFRS* diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Namun di Indonesia, hanya perusahaan yang telah *listing* yang diwajibkan untuk menggunakan standar akuntansi yang dikonvergensi ke *IFRS*.

Berikut *roadmap* konvergensi *IFRS* di Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tabel 2.1 Roadmap Konvergensi IFRS di Indonesia

Tahun	Tahapan	Keterangan
2008-2010	Tahap Adopsi	1. Adopsi seluruh <i>IFRS</i> ke PSAK 2. Persiapan Infrastruktur yang diperlukan 3. Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku
2011	Tahap Persiapan Akhir	1. Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan 2. Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis <i>IFRS</i>
2012	Tahap Implementasi	1. Penerapan PSAK berbasis <i>IFRS</i> secara bertahap 2. Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif

(Sumber: Aprilicia, 2013)

Dijelaskan bahwa terdapat kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam *IFRS* di Indonesia yaitu (Zamzami, 2011):

1. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya.
2. *IFRS* berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar *IFRS* masih dilakukan, pihak *IASB* sudah dalam proses mengganti *IFRS* tersebut.
3. Kendala bahasa, karena setiap standar *IFRS* harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali ini tidaklah mudah.
4. Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi *IFRS* banyak

metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan.

5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke *IFRS*.

6. *Support* pemerintah terhadap isu konvergensi.

Selanjutnya penelitian ini memfokuskan *IFRS* pada praktik standar *IAS 39* (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran). Adopsi standar *IAS 39* di Indonesia adalah PSAK 55 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran). Dimana standar ini berlaku di Indonesia pada tahun 2008, yang kemudian ditunda pemberlakuannya hingga tahun 2010. Revisi terbaru PSAK 55 menghasilkan PSAK 55 (2014). Berlakunya PSAK 55 menyebabkan beberapa standar PSAK yang berkaitan dengan instrumen keuangan dicabut akibat ketidaksesuaian dengan *IFRS* (Martani dkk, 2012:165). Standar yang dihapus meliputi PSAK 41 mengenai Akuntansi Waran, PSAK 43 mengenai Akuntansi Anjak Piutang, PSAK 54 mengenai Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah, PSAK 30 mengenai Akuntansi Perusahaan Perbankan, PSAK 42 mengenai Akuntansi Perusahaan efek, dan PSAK 49 mengenai Akuntansi Reksa Dana. Pencabutan tersebut menyebabkan tidak adanya aturan untuk industri tertentu karena standar akuntansi berdasarkan *IFRS* lebih menekankan pada substansi transaksi dan komponen yang dilaporkan bukan pada jenis industri entitas (Martani dkk, 2012:165).

2.1.6 *IFRS* di Malaysia

Malaysia merupakan negara asia yang juga menerapkan *IFRS*. Hal tersebut dilakukan mengingat Malaysia juga merupakan anggota G-20. Komitmen atas keputusan forum G20 mendorong Malaysia mewajibkan penggunaan *IFRS* sebagai pedoman standar akuntansi. Selain itu Malaysia menerapkan *IFRS* untuk memunculkan image “*IFRS-compliant*”, sehingga dapat menarik investor internasional untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan di Malaysia (Putih (2008) dalam NN, www.mia.org.my/at/at/200810/06.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2015).

Berikut *roadmap* konvergensi *IFRS* di Malaysia yang disusun oleh *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB).

Tabel 2.2 Roadmap Konvergensi IFRS di Malaysia

Tahun	Tahapan	Keterangan
2008-2009	Tahap Persiapan	1. Pengumuman Konvergensi <i>IFRS</i> 2. Monitoring perkembangan konvergensi <i>IFRS</i> 3. Pelatihan dan pendidikan mengenai <i>IFRS</i>
2010	Tahap Implementasi <i>MFRS</i> 139	1. Implementasi <i>MFRS</i> 139 secara mandatori 2. Monitoring implementasi <i>MFRS</i> 139
2012	Tahap Implementasi Penuh	1. Implementasi <i>IFRS</i> secara penuh bagi perusahaan terbuka 2. Pilihan menggunakan <i>IFRS</i> bagi perusahaan tertutup (<i>private entities</i>)

(NN, www.mia.org.my/at/at/200810/06.pdf. Diakses pada tanggal 12-10-2015)

Berdasarkan *roadmap* konvergensi di atas diketahui bahwa Malaysia memiliki waktu konvergensi yang sama dengan Indonesia. Pengumuman konvergensi di Malaysia pada tahun 2008 dan pelaksanaan *IFRS* secara *full* di Malaysia pada tahun 2012 (NN, www.mia.org.my/at/at/200810/06.pdf. Diakses pada 12 Oktober 2015). Lebih lanjut lagi terkait dengan penerapan *IAS* 39 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran), Malaysia melakukan pemberlakuan pada tahun tahun 2010 untuk adopsi *IAS* 39 (NN, www.mia.org.my/at/at/200810/06.pdf, diakses pada 12 Oktober 2015). *IAS* 39 diadopsi menjadi *MFRS* 139 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran). Revisi *MFRS* 139 terbaru pada tahun 2014 yang menghasilkan *MFRS* 139 (2014).

2.1.7 Instrumen Keuangan dan Manajemen Laba

IAS 39 merupakan standar mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh *IFRS*. Instrumen keuangan sendiri menurut *IAS* 39 didefinisikan sebagai kontrak yang memberikan kenaikan baik untuk aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas lainnya (Greuning dkk, 2013:218). Pada *IAS* 39 dijelaskan bahwa terdapat empat kelompok aset keuangan, yaitu: aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (*fair value to profit and loss*- FVPL), investasi dipegang hingga jatuh tempo (*held to maturities*-HTM), aset keuangan tersedia untuk dijual (*available to*

sale-AFS), dan pinjaman yang diberikan atau piutang (*loans or receivable-LR*). Lebih lanjut, standar ini mengidentifikasi dua kelompok liabilitas keuangan yaitu liabilitas pada nilai wajar dan liabilitas pada biaya yang diamortisasi. Instrumen ekuitas lainnya terdiri dari instrumen ekuitas, instrumen derivatif, dan instrumen lindung nilai.

Standar *IAS 39* menjelaskan juga mengenai perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan yaitu terkait dengan kerugian penurunan nilai dan reklasifikasi. Kerugian penurunan nilai mengatur terkait aset keuangan, dalam hal ini pinjaman yang diberikan atau piutang (*loans or receivable-LR*). Standar tersebut menjelaskan bahwa pinjaman atau piutang dapat diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang objektif (termasuk data yang dapat diamati) seperti hasil satu atau lebih kejadian yang telah terjadi setelah pengakuan awal dari aset (Greuning dkk, 2013:221). Selain itu keterangan mengenai penilaian kolektif dari penurunan nilai harus mengelompokkan aset menurut resiko kredit yang sama dan indikasi kemampuan debitur membayar semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan persyaratan kontrak.

Aturan mengenai penurunan nilai piutang atau pinjaman tersebut memberikan indikasi pencegahan terhadap manajemen laba. Manajemen laba pada perusahaan perbankan dapat terjadi akibat bank melakukan pencadangan besar terhadap kerugian kredit dengan alasan kehati-hatian (Anggraita, 2012). Hal tersebut dilakukan agar laba dapat turun dengan tujuan menghindari pajak atau mengatur kinerja laba (Anggraita, 2012). Oleh karena itu, dengan berlakunya *IAS 39* menuntut tiap perusahaan dalam hal ini perbankan untuk memperketat perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hal tersebut dikarenakan penurunan nilai aset piutang atau pinjaman dapat dilakukan jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai tersebut memang harus dilakukan (Greuning dkk, 2013:221).

Lebih lanjut, standar *IAS 39* juga mengatur mengenai reklasifikasi. Reklasifikasi merupakan perubahan terkait pengelompokan aset keuangan (Martini dkk, 2012:176). Standar *IAS 39* menjelaskan bahwa entitas tidak diperbolehkan mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori aset

keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (*fair value to profit and loss* -FVPL). Aset tersedia untuk dijual (*available to sale*-AFS) diperbolehkan direklasifikasi menjadi pinjaman atau piutang (*loans or receivable*-LR) jika memenuhi ketentuan LR serta terdapat tujuan dan kemampuan untuk mempertahankan dalam waktu dekat. Aset pinjaman atau piutang (*loans or receivable*-LR) tidak diperbolehkan direklasifikasi. Aset keuangan investasi dipegang hingga jatuh tempo (*held to maturities*-HTM) tidak diperbolehkan direklasifikasi kecuali memenuhi *tainting rule* yaitu investasi HTM harus direklasifikasi menjadi AFS. Reklasifikasi dikarenakan terdapat suatu perubahan intensi manajemen/kemampuan entitas sehingga manajemen harus menjual investasi HTM sehingga HTM diklasifikasi menjadi AFS.

Aturan mengenai reklasifikasi dapat mencegah terjadinya manajemen laba. Contohnya saja pada pelarangan reklasifikasi FVPL. Larangan tersebut diharapkan dapat menghilangkan *moral hazard* menggunakan reklasifikasi untuk manajemen laba (Martani dkk, 2012:176). Misalkan ketika terjadi kenaikan nilai investasi, entitas mereklasifikasi AFS menjadi FVPL untuk memperoleh laba, namun ketika terjadi penurunan nilai investasi direklasifikasikan dari FVPL menjadi AFS atau kategori yang lain untuk menghindari kerugian.

2.1.8 Peraturan Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39 di Indonesia

Peraturan standar mengenai instrumen keuangan di Indonesia diatur dalam PSAK 55 yang pada awalnya mengadopsi SFAS 115 dan SFAS 133 kemudian dengan adanya konvergensi IFRS, standar ini mengubah acuannya pada IAS 39 (Saputra, 2013). Perubahan mengenai peraturan instrumen keuangan yang mengadopsi IAS 39 memberikan perbedaan dalam hal pengakuan dan pengukuran. Perbedaan tersebut mengindikasikan kemungkinan terhadap perbedaan kualitas laba yang dihasilkan. Standar instrumen keuangan di Indonesia sebelum adopsi IAS 39 mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi 3 kelompok yaitu 1). Diperdagangkan, 2). Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*-HTM), 3). Tersedia untuk dijual (*available to sale*-AFS). Sedangkan setelah adopsi IAS 39

terdapat tambahan kelompok instrumen keuangan yaitu (*loans or receivable-LR*) dan instrumen diperdagangkan diganti menjadi instrumen diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value to profit and loss-FVPL*) (Saputra, 2013).

Selanjutnya pada standar instrumen keuangan sebelum adopsi dijelaskan bahwa standar mengharuskan pengkajian kembali terkait dengan kelayakan pengelompokan instrumen keuangan dan memperbolehkan reklasifikasi dari/ke kelompok diperdagangkan (sekarang *fair value to profit and loss-FVPL*) serta reklasifikasi dari kelompok *HTM* ke *AFS*, sedangkan pada standar instrumen keuangan setelah adopsi *IAS 39* tidak memperbolehkan adanya reklasifikasi dari/ke *FVPL* dan kelompok *HTM* dapat direklasifikasi menjadi *AFS* ketika memenuhi *tainting rule*. Peraturan mengenai reklasifikasi ini mampu mengurangi praktik manajemen laba karena menghilangkan *moral hazard* (Martani dkk, 2012).

Selain itu, pada standar instrumen keuangan sebelum mengadopsi *IAS 39* pengakuan piutang adalah sebesar nilai bersih yang terealisasi dan cadangan kerugian piutang dinilai berdasarkan umur historis piutang (Ariefiara, 2013). PSAK 55 adopsi *IAS 39* memberikan aturan bahwa penurunan nilai piutang harus didasari oleh bukti yang obyektif bahwa terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai piutang (Ariefiara, 2013) (Saputra, 2013), sehingga adanya perubahan tersebut dapat memperketat penentuan cadangan kerugian piutang (CKPN) yang ditentukan oleh entitas.

2.1.9 Peraturan Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Adopsi *IAS 39* di Malaysia

Peraturan mengenai instrumen keuangan di Malaysia diatur dalam *MFRS 139*. The dkk (2013) menjelaskan bahwa perkembangan standar instrumen keuangan dan derivatif di Malaysia terdiri dari 3 fase yaitu:

1. Hingga tahun 2001 tidak terdapat standar yang menjadi pedoman/acuan mengenai instrumen keuangan dan derivatif
2. Tahun 2001-2005 *MASB* mengeluarkan standar *MASB 24* yaitu standar mengenai instrumen keuangan dan derivatif yang hanya mengatur mengenai

penyajian dan pengungkapan. Hingga tahun 2006, *MASB* 24 dihapuskan dan Malaysia memperbarui standar *MASB* 24 dengan *MFRS* 132 Instrumen keuangan: Pengungkapan dan Penyajian yang diadopsi dari *IAS* 32.

3. Tahun 2010 Malaysia mengeluarkan standar *MFRS* 139 yang mengadopsi *IAS* 39. Standar ini mengatur mengenai instrumen keuangan terkait dengan pengakuan dan pengukuran.

Berdasarkan tiga fase tersebut dapat diketahui bahwa di negara Malaysia sebelum tahun 2010, tidak terdapat standar yang mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Hassan dan Saleh (2010) bahwa sebelum tahun 2010 hanya standar mengenai pengungkapan dan penyajian instrumen keuangan saja yang tersedia di Malaysia. Penundaan adopsi *IAS* 39 hingga tahun 2010 dikarenakan perusahaan di Malaysia tidak siap untuk mengubah pendekatan biaya historis menjadi nilai wajar (*fair value*) yang diharuskan oleh *IFRS* khususnya pada standar *IAS* 39 (Hassan dan Saleh, 2010).

The dkk (2013) menjelaskan bahwa adopsi *IAS* 39 di Malaysia memunculkan kategori instrumen keuangan salah satunya yaitu *FVPL* dimana instrumen ini diukur melalui nilai wajar sehingga perubahan ini mengubah pendekatan historis yang digunakan oleh Malaysia ke arah pendekatan nilai wajar (Akgun dkk (2011) dalam The dkk (2013)). Selain itu adopsi *IAS* 39 mengatur terkait kebijakan reklasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya tidak diatur di Malaysia (The dkk, 2013). Lebih lanjut lagi, adopsi *IAS* 39 mengatur dengan ketat mengenai penurunan nilai instrumen keuangan. Entitas dapat melakukan penurunan nilai pada asetnya jika ditemukan bukti yang objektif terkait dengan penurunan tersebut, misalkan terkait dengan instrumen pinjaman dan piutang dapat mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti obyektif bahwa perusahaan peminjam mengalami kebangkrutan (*Malaysian Institute Of Accountants (MIA)*, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu telah mengeksplorasi penelitian terkait penerapan *IFRS* dan manajemen laba. Beberapa penelitian masih menunjukkan adanya keragaman hasil. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil penelitian peneliti terdahulu.

Barth dkk (2007) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara pengaruh penerapan *IFRS* (standar secara keseluruhan) terhadap manajemen laba dengan sampel 21 negara. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan keuangan dan non keuangan dengan periode pengamatan 10 tahun (1994-2003). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sehingga dengan adanya penerapan standar *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Houqe dkk (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penerapan *IFRS* terhadap kualitas laba dengan proksi manajemen laba di 46 negara. Penerapan *IFRS* diukur melalui tahun penerapan secara wajib di suatu negara. Penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan non keuangan dengan periode pengamatan selama 10 tahun (1998-2007). Berbeda halnya dengan hasil pengujian Barth dkk (2007), pada pengujian ini disimpulkan bahwa penerapan *IFRS* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga penerapan *IFRS* tidak memberikan dampak terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Rudra dan Bhattacharjee (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penerapan *IFRS* dengan manajemen laba di negara India. Variabel *IFRS* ditunjukkan untuk seluruh standar. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan keuangan dan non keuangan di negara India dengan periode pengamatan 1 tahun (2010). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga penerapan *IFRS* tidak memberikan dampak terhadap aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Anggraita (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh antara penerapan *IFRS* (PSAK 50/55) dengan manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan keuangan dengan menghususkan pada perusahaan perbankan di Indonesia dengan periode pengamatan 2 tahun yaitu 2009-2010. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga dengan adanya penerapan standar *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Rohaeni dan Aryati (2012) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara penerapan *IFRS* dengan manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan non keuangan dengan mengkhhususkan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, Singapura, dan China dengan periode pengamatan tahun 2006-2010. Hasil pengujian menunjukkan penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga dengan adanya penerapan standar *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Santy dan Pontoh (2012) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara penerapan *IFRS* (PSAK 50/55) dengan manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan keuangan dengan mengkhhususkan pada perusahaan perbankan di Indonesia dengan periode pengamatan 4 tahun (2008-2011). Hasil pengujian menunjukkan penerapan *IFRS* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga penerapan *IFRS* tidak memberikan dampak terhadap aktifitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Qomariah dan Marsono (2012) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara penerapan *IFRS* dengan manajemen laba. Perusahaan menerapkan *IFRS* apabila terdapat penyesuaian pada laporan perubahan ekuitas karena adanya revisi atas PSAK yang sudah diterapkan dan dikatakan perusahaan tidak menerapkan *IFRS* apabila tidak terdapat penyesuaian pada laporan perubahan ekuitas karena adanya revisi atas PSAK yang diterapkan. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode pengamatan selama 4 tahun (2009-2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga dengan adanya penerapan standar *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Narendra dan Haryanto (2013) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penerapan *IFRS* terhadap manajemen laba. Penerapan *IFRS* dilihat secara keseluruhan tidak spesifik pada beberapa standar. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan non keuangan, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode pengamatan selama 2 tahun (2011-2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh positif terhadap

manajemen laba, sehingga dengan adanya penerapan standar *IFRS* malah meningkatkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Sellami dan Fakhfakh (2014) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara penerapan *IFRS* dengan manajemen laba. Indikator variabel *IFRS* dinilai 0 untuk tahun sebelum *IFRS* diwajibkan (*PRE_IFRS*) yaitu tahun 1999-2004 dan dinilai 1 untuk tahun setelah *IFRS* diwajibkan (*POST_IFRS*) yaitu tahun 2006-2011. Pengamatan tahun 2005 dihilangkan untuk menghindari bias akibat tahun pertama adopsi *IFRS*. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan non keuangan di Perancis dengan periode pengamatan 12 tahun (1999-2011). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga penerapan standar *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan.

Nurazmi dkk (2015) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara penerapan *IFRS* (*PSAK 50/55*) dengan manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan sampel perusahaan keuangan dengan mengkhhususkan pada perusahaan perbankan di Indonesia dengan periode pengamatan 5 tahun (2008-2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *IFRS* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga penerapan *IFRS* mampu menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sampel	Pengukuran Manajemen Laba	Pengukuran <i>IFRS</i>	Hasil Penelitian
Negatif					
1	Barth dkk (2007)	Perusahaan Keuangan dan Nonkeuangan (1994-2003)	Variabilitas perubahan laba bersih	Variabel Dummy	Negatif
2	Qomariah dan Marsono (2012)	Perusahaan Manufaktur (Indonesia, 2009-2012)	Model Jones dimodifikasi	Variabel Dummy	Negatif
3	Anggraita (2012)	Perusahaan Perbankan (Indonesia, 2009-2010)	Model Beaver Engel	Variabel Dummy <i>PSAK 50/55</i>)	Negatif

No	Peneliti	Sampel	Pengukuran Manajemen Laba	Pengukuran IFRS	Hasil Penelitian
4	Rohaeni dan Aryati (2012)	Perusahaan Manufaktur (Indonesia, Singapura, China, 2006-2010)	Korelasi Spearman (<i>Income Smoothing</i>)	Indeks IGAAP CLSA	Negatif
5	Sellami dan Fakhfakh (2014)	Perusahaan Nonkeuangan (French, 1999-2011)	Model Jones dimodifikasi	Variabel Dummy	Negatif
6	Nurazmi dkk (2015)	Perusahaan Perbankan (Indonesia, 2008-2012)	Model Beaver Engel	Variabel Dummy PSAK 50/55	Negatif
Positif					
7	Narendra dan Haryanto (2013)	Perusahaan Manufaktur (Indonesia, 2011-2012)	Model Jones dimodifikasi	Variabel Dummy	Positif
Netral					
8	Santy dan Pontoh (2012)	Perusahaan Perbankan (Indonesia, 2008-2011)	Model Beaver Engel	Variabel Dummy PSAK 50/55	Netral
9	Houqe dkk (2011)	Perusahaan Nonkeuangan (1998-2007)	Model DeFond dan Park	Variabel Dummy	Netral
10	Rudra dan Bhattacharjee (2011)	Perusahaan Keuangan dan Perusahaan Nonkeuangan (India, 2010)	Model Jones dimodifikasi	Variabel Dummy	Netral

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi keragaman hasil penelitian terkait pengaruh penerapan *IFRS* terhadap manajemen laba. Terlebih lagi penelitian yang menguji pengaruh penerapan adopsi *IAS 39* terhadap manajemen laba juga mengalami hasil yang beragam. Penelitian oleh Anggraita (2012) dan Nurazmi (2015) menunjukkan bahwa

penerapan adopsi *IAS 39* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian oleh Santy dan Pontoh (2012) menunjukkan bahwa adopsi *IAS 39* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Barth dkk (2007), Qomariah dan Marsono (2012), Rohaeni dan Aryati (2012), Sellami dan Fakhfakh (2014), Narendra dan Haryanto (2013), Houqe dkk (2011), Rudra dan Bhattacharjee (2011) adalah terletak pada fokus *IFRS* yang diteliti, dimana pada penelitian ini lebih dikhususkan pada standar *IFRS* yang mengatur mengenai instrumen keuangan yaitu *IAS 39* mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menggunakan indikator *IFRS* dengan penerapan *IAS 39* yaitu: Anggraita (2012), Nurazmi dkk (2015), dan Santy dan Pontoh (2012) adalah terletak sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak hanya Indonesia tetapi penelitian ini juga menggunakan sampel dari negara Malaysia sehingga peneliti dapat membandingkan dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, perbedaan yang lebih mendasar antara penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah dalam penentuan sampel. Penentuan sampel menggunakan kriteria *suspect firm*. Pada penelitian terdahulu tidak ada peneliti yang menentukan terlebih dahulu apakah perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang terduga melakukan manajemen laba (*suspect firm*). Roychowdhury (2006) menyatakan bahwa penentuan kriteria *suspect firm* dapat meningkatkan kekuatan dalam mendeteksi manipulasi laba. Sejalan dengan Cohen (2007), penentuan *suspect firm* digunakan untuk meningkatkan kepercayaan atas hasil penelitian yang mencerminkan manajemen laba. Perbedaan mendasar lainnya adalah terletak pada pengujian yang dilakukan. Pada penelitian ini digunakan uji beda untuk melihat pengaruh yang timbul terhadap manajemen laba akibat penerapan *IAS 39*.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Teori agensi menjelaskan mengenai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak prinsipal dengan pihak agen, dimana prinsipal memberikan delegasi

wewenang pengambilan keputusan kepada pihak agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan antara agen dan prinsipal dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. Delves dan Patrick (2010) menjelaskan bahwa meskipun prinsipal dan agen bekerja dengan tujuan sama, tetapi mereka tidak selalu memiliki kepentingan yang sama sehingga rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan. Permasalahan konflik kepentingan tersebut akhirnya mengarah pada manajemen laba yang didukung dengan adanya asimetri informasi.

Manajemen laba merupakan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Berdasarkan teori agensi, manajemen laba dapat terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang didukung dengan adanya asimetri informasi. Lebih lanjut lagi, standar akuntansi berbagai dunia mulai mengarah pada penggunaan *IFRS*. Bahkan banyak negara mewajibkan penggunaan dari standar akuntansi *IFRS*. Penggunaan *IFRS* sebagai pedoman standar dianggap mampu mengurangi manajemen laba oleh perusahaan. Hal tersebut berdasarkan pada karakteristik *IFRS* yang menekankan pada banyaknya pengungkapan.

Sejalan dengan pemaparan Scott (2009:426), dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengurangi adanya manajemen laba adalah dengan melakukan pengungkapan. Selain itu, *IFRS* merupakan pedoman yang bersifat *principles based* artinya standar yang diatur lebih bersifat prinsip dan aturan terkait akuntansi lebih dipersempit sehingga dapat mengurangi celah pelanggaran (Cahyati, 2011). Lebih jauh lagi, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh *IFRS* (*IAS 39 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan melalui pengujian sebelum sesudah penerapan *IAS 39*. Beberapa standar yang diatur dalam *IAS 39* dapat memberikan kontribusi mengurangi manajemen laba oleh perusahaan yaitu terkait dengan *impairment* dan *reclassification*.

Manajemen laba dalam perusahaan perbankan dapat dilakukan dengan melakukan penumpukan cadangan kerugian piutang dengan alasan kehati-hatian sehingga laba dapat turun dengan tujuan menghindari pajak atau mengatur kinerja laba (Anggraita, 2012). Namun *IAS 39* mengatur mengenai *impairment* atau

penurunan nilai. Penurunan nilai dapat dilakukan pada aset keuangan dalam hal ini instrumen pinjaman dan piutang, jika terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai pada aset tersebut (Greuning dkk, 2013:221), sehingga penentuan cadangan kerugian piutang (CKPN) ditentukan secara ketat dan perusahaan tidak bisa melakukan penumpukan CKPN. Bahkan di Indonesia menurut Nurazmi dkk (2015), salah satu bukti obyektif penentuan CKPN yaitu menggunakan data historis 3 tahun kebelakang dengan valuasi debitor secara individual. Malaysia dalam *MFRS 139 (Malaysian Institute Of Accountants, 2009)*, menjelaskan pula bahwa penurunan nilai dapat dilakukan jika terdapat bukti obyektif suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tersebut. Salah satu indikator penurunan nilai dilakukan jika perusahaan peminjam mengalami kebangkrutan.

Selain itu, penerapan standar *IAS 39* dapat mengurangi manajemen laba karena terdapat peraturan ketat mengenai reklasifikasi instrumen keuangan. Aturan dalam reklasifikasi adopsi *IAS 39* menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya reklasifikasi dari/ke aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (*fair value to profit and loss-FVPL*). Hal tersebut dikarenakan reklasifikasi dari/ke *FVPL* dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Misalkan ketika terjadi kenaikan nilai investasi, entitas mereklasifikasi aset tersedia untuk dijual (*available to sale-AFS*) menjadi aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (*fair value to profit and loss-FVPL*) untuk memperoleh laba, namun ketika terjadi penurunan nilai investasi direklasifikasikan dari *FVPL* menjadi *AFS* atau kategori yang lain untuk menghindari kerugian (Martani dkk, 2012:176).

Lebih lanjut lagi, aturan reklasifikasi mengatur bahwa aset tersedia untuk dijual (*available to sale-AFS*) diperbolehkan direklasifikasi menjadi pinjaman atau piutang (*loans or receivable-LR*) jika memenuhi ketentuan *LR* serta terdapat tujuan dan kemampuan untuk mempertahankan dalam waktu dekat. Aset pinjaman atau piutang (*loans or receivable-LR*) tidak diperbolehkan direklasifikasi. Aset keuangan investasi dipegang hingga jatuh tempo (*held to maturity-HTM*) tidak diperbolehkan direklasifikasi kecuali memenuhi *tainting*

rule, sehingga dengan tegas Martani dkk (2012:176) menyatakan bahwa aturan reklasifikasi dapat menghilangkan *moral hazard* manajer untuk mengintervensi laba.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan IAS 39 menyebabkan tuntutan adanya pengungkapan yang penuh, penentuan penurunan nilai atau cadangan kerugian piutang (CKPN) secara ketat dengan data bukti obyektif, dan aturan ketat atas reklasifikasi instrumen keuangan. Tiga dampak penerapan standar IAS 39 tersebut mengarah pada menurunnya manajemen laba oleh perusahaan perbankan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan praktik *IFRS* dan manajemen laba oleh Anggraita (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan standar *IFRS* menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan. Begitu pula dengan penelitian oleh Sellami dan Fakhfakh (2014) menunjukkan hasil penelitian adanya penurunan praktik manajemen laba karena pelaksanaan standar akuntansi *IFRS*. Nurazmi dkk (2015) juga menyimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan nilai wajar dan persyaratan pengungkapan penuh mampu mengurangi praktik manajemen laba.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H0 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.**
- H1 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.**
- H0 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.**
- H2 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.**

- H0** : Manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.
- H3** : Manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.

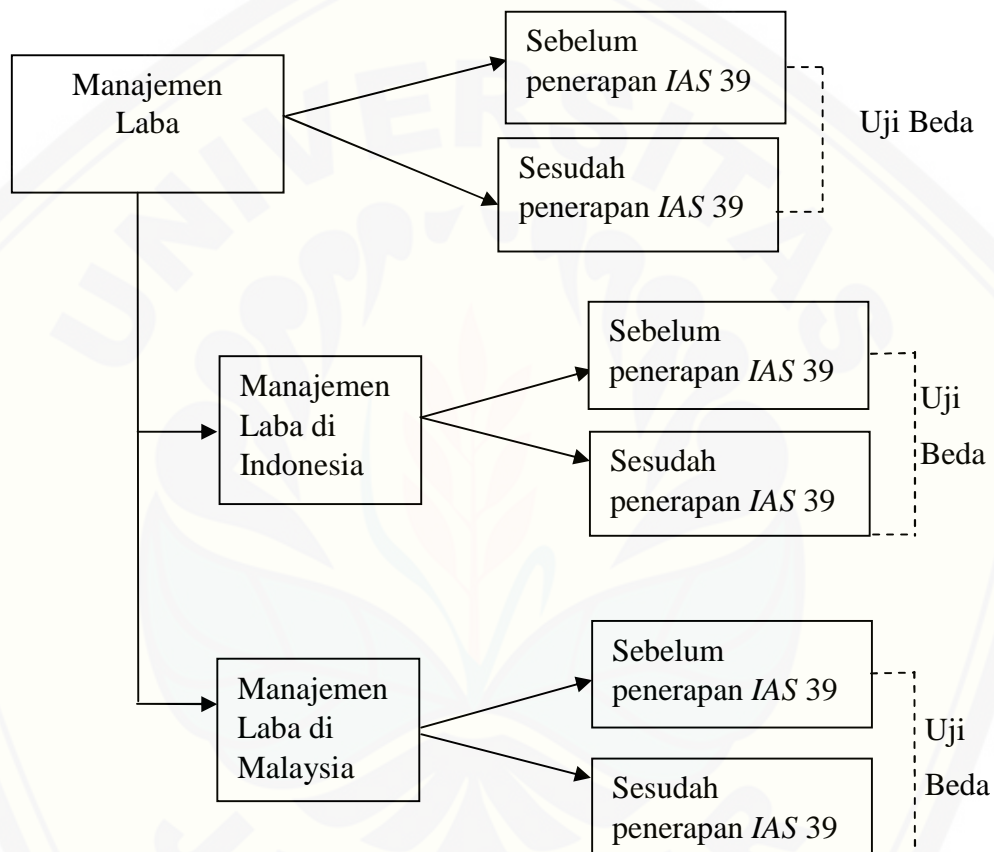
2.4 Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual penelitian ini terbentuk melalui rangkaian teori, pengujian empiris, serta pemikiran analitis mengenai pengaruh penerapan *IAS 39* terhadap manajemen laba. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pihak prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan agensi atau keagenan seringkali memunculkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen (Delves dan Patrick, 2010). Konflik kepentingan yang didukung oleh asimetri informasi akan mengarah pada tindakan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan intervensi terhadap laba yang dilakukan oleh pihak manajemen atas tujuan tertentu. Oleh karena itu, teori keagenan merupakan teori yang mendasari penelitian empiris ini.

Salah satu peluang pihak manajemen melakukan manajemen laba adalah melalui pemanfaatan celah dalam standar akuntansi. Hal itu mengindikasikan perlunya suatu standar akuntansi yang mampu menutupi celah tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemikiran tersebut sejalan dengan berlakunya *IFRS* sebagai sebuah standar internasional yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Lebih lanjut lagi, salah satu standar didalam *IFRS* yang dianggap mampu mengurangi manajemen laba adalah *IAS 39* dengan aturan reklasifikasi dan penentuan penurunan nilai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia. Kemudian, penelitian lanjutan dilakukan secara terpisah antara sampel Indonesia dan Malaysia. Proksi manajemen laba menggunakan *discretionary accruals* yang

dihitung melalui rumus Beaver dan Engel (1996). Pengujian penelitian ini dilakukan dengan membandingkan *discretionary accruals* pada periode sebelum dan sesudah penerapan IAS 39. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji beda *independent sample t-test*. Berdasarkan uraian di atas, maka rerangka konseptual pada penelitian ini yakni:



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999:12). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 1999: hal 147).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan. Informasi yang berasal dari data laporan tahunan digunakan untuk pengukuran deteksi manajemen laba oleh perusahaan. Data laporan tahunan tersebut menggunakan periode tahun 2008-2009 dan 2010-2011. Dasar pemilihan periode pengamatan penelitian dikarenakan Indonesia dan Malaysia mengumumkan konvergensi *IFRS* pada tahun 2008. Pengujian dilakukan dengan menguji manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi sehingga periode penelitian diambil pada 2 tahun sebelum penerapan *IAS 39* dan 2 tahun setelah penerapan *IAS 39*. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan untuk Indonesia didapatkan dari www.idx.co.id dan website perusahaan. Data laporan tahunan untuk Malaysia didapatkan dari www.bursamalaysia.com, www.malaysia.stock.biz, dan website perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi yang akan diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan di negara Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan proses translasi mata uang asing pada pengujian hipotesis (H1). Pengujian hipotesis (H2) dan (H3) tidak memerlukan translasi karena

pengujian dilakukan untuk setiap negara tersendiri. Translasi dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan dasar mata uang, dalam hal ini, mata uang Malaysia ditranslasikan terhadap mata uang Indonesia yaitu rupiah.

Terdapat empat pilihan metode translasi mata uang asing yaitu *Current*, *Current-Noncurrent*, *Moneter-Nonmoneter*, dan kurs sementara. Penelitian ini menggunakan metode *Current*. Metode ini mentranslasikan mata uang Malaysia dengan nilai tukar mata uang Indonesia pada akhir periode pelaporan. Semua item dalam neraca dikalikan dengan satu konstanta yang sama. Metode ini dipilih karena tidak mengubah dasar akuntansi hanya bentuk presentasinya saja yang berubah. Choi dan Meek (2012:253) menjelaskan bahwa translasi mata uang asing pada kurs saat ini (metode *current*) tidak mengubah dasar hubungan (seperti rasio keuangan) karena semua item dalam neraca dikalikan oleh sebuah konstanta.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pemilihan sampel non probabilitas dengan pola pengambilan sampel yang dilakukan secara *purposive sampling* atau pemilihan sampel bertujuan. Periode pengamatan pada penelitian ini pada tahun 2008-2009 dan 2010-2011.

Kriteria pengambilan sampel untuk penelitian ini, meliputi;

1. Perusahaan perbankan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008-2011.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) selama periode 2008-2011.
3. Data mengenai variabel penelitian yang diteliti tersedia lengkap dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2008-2011.
4. Perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba (*suspect firm*). Kriteria ini berdasarkan pada penelitian Wahyuni (2009) dan Nuha dkk (2014), dimana kriteria tersebut meliputi:
 - a. Perusahaan dengan nilai laba bersih dibagi aset total sama dengan atau lebih besar dari nol namun kurang dari 0,005 (Roychowdhury, 2006).

- b. Perusahaan dengan nilai perubahan laba bersih dibagi aset total sama dengan atau lebih besar dari nol namun kurang dari 0,005 (Cohen dkk, 2007).

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 1999:69). Penelitian ini menggunakan variabel manajemen laba. Berikut penjelasan mengenai variabel manajemen laba.

3.3.2 Manajemen Laba

Variabel manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual*. Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan jenis perbankan, dimana memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan nonkeuangan, sehingga metode pengukuran manajemen laba akrual juga harus menggunakan model khusus perbankan. Mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Nurazmi dkk (2015), model pengukuran manajemen laba akrual di perusahaan perbankan menggunakan model Beaver dan Engel (1996).

Langkah pertama perhitungan pada model ini adalah dengan melakukan regresi untuk mendapatkan koefisien β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 dari rumus berikut ini (Beaver dan Engel, 1996):

$$NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 NPA_{it+1} + \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

CO_{it} : *Loan charge-offs* (pinjaman yang dihapusbukukan) perusahaan i di tahun t;

$LOAN_{it}$: Pinjaman yang beredar (*loans outstanding*) perusahaan i di tahun t;

NPA_{it} : *Non performing assets* (aset yang bermasalah) perusahaan i di tahun t, terdiri dari a) dalam perhatian khusus, b) kurang lancar, c) diragukan, dan d) macet

NPA_{it+1} : Selisih *non performing assets* tahun t+1 dengan tahun t ;

Sebelum melakukan regresi untuk mendapatkan nilai koefisien β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 , semua variabel yaitu CO_{it} , $LOAN_{it}$, NPA_{it} , dan NPA_{it+1} terlebih dahulu dideflasi dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman (Beaver dan Engel, 1996). Setelah didapatkan nilai koefisien β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 maka selanjutnya dihitung nilai *non-discretionary accruals* (NDA_{it}) untuk tiap perusahaan ditiap tahun pengamatan (Beaver dan Engel, 1996). Langkah kedua adalah menghitung nilai *discretionary accruals* (DA_{it}). *Discretionary accruals* (DA_{it}) dapat dihitung dengan mengurangkan nilai total akrual (TA_{it}) dengan nilai *non-discretionary accruals* (NDA_{it}). Dapat dirumuskan sebagai berikut (Beaver dan Engel, 1996):

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

TA_{it} : Total akrual menggunakan saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) perusahaan i di tahun t;

NDA_{it} : *Non-discretionary accruals*

DA_{it} : *Discretionary accruals*

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) untuk mempermudah proses pengujian. Berikut uji yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian.

3.4.2 Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian terdistribusi normal dan sampel penelitian telah mewakili populasi yang ada.

Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2013:160):

- a Angka signifikan (SIG) $> 0,05$, maka data terdistribusi normal
- b Angka signifikan (SIG) $< 0,05$, maka data terdistribusi tidak normal

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis (H1) dilakukan dengan membandingkan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran). Pengujian H1 merupakan pengujian total karena melibatkan sampel perusahaan perbankan di negara Indonesia dan Malaysia. Pengujian berikutnya dilakukan untuk mengkonfirmasi H2, pengujian dilakukan dengan membandingkan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, pengujian dilakukan untuk menjawab H3 dengan membandingkan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) pada perusahaan perbankan di Malaysia.

Pengujian hipotesis (H1), (H2), dan (H3) dilakukan dengan menggunakan menggunakan *Independent Sample T-test* atau uji beda *t-test*. Namun bila pada saat uji normalitas data tidak terdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan uji *mann-whitney*.

3.5.1 Uji *Independent Sample T-test*

Uji *independent sample t-test* merupakan pengujian perbedaan rata-rata untuk sampel yang tidak berhubungan (Ghozali, 2013:66). Pengujian dengan *independent sample t-test* dianalisis melalui dua tahap. Tahap pertama dengan menguji dahulu asumsi apakah variance populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Jika, nilai signifikansi dari *levene test* kurang dari 0,05 maka nilai *t-test* dilihat dari *equal variance not assumed*, sedangkan bila nilai signifikansi dari *levene test* lebih besar dari 0,05 maka nilai *t-test* dilihat dari *equal variance assumed*. Setelah itu langkah kedua adalah melihat nilai *t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan.

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan pengujian 2 sisi sehingga kriteria pengujian menjadi (Siregar, 2014):

- a. Jika $\text{sig} > 0,05/2$, maka manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 tidak lebih kecil daripada manajemen laba sesudah penerapan IAS 39.
- b. Jika $\text{sig} < 0,05/2$, maka manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 lebih kecil daripada manajemen laba sesudah penerapan IAS 39.

3.5.2 Mann –Whitney Test

Mann-whitney test merupakan pengujian non parametrik yang digunakan untuk menguji beda dua sampel yang independen dan tidak bergantung satu sama lain (Santoso, 2001:118). Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan pengujian 2 sisi sehingga tingkat signifikansi menjadi 0,05/2. Jika probabilitas kurang dari taraf atau tingkat signifikansi maka manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 lebih kecil daripada manajemen laba sesudah penerapan IAS 39. Sebaliknya jika probabilitas lebih dari taraf atau tingkat signifikansi maka manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 tidak lebih kecil daripada manajemen laba sesudah penerapan IAS 39.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008-2011. Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di negara Indonesia pada tahun 2008-2011 tercatat sebanyak 118 perusahaan. Sedangkan, perusahaan perbankan yang terdaftar di Malaysia pada tahun 2008-2011 tercatat sebanyak 48 perusahaan. Pemilihan sampel selanjutnya dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai kriteria penelitian. Berikut proses penentuan kriteria sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Penentuan Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
Hipotesis 1		
1	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia	166
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan 2008-2011	(1)
3	Perusahaan dengan data variabel penelitian tidak lengkap	0
4	Perusahaan diduga tidak terlibat manajemen laba	(69)
	Jumlah sampel perusahaan diduga terlibat manajemen laba	96
Hipotesis 2		
1	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	118
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan	(1)
3	Perusahaan dengan data variabel penelitian tidak lengkap	0
4	Perusahaan diduga tidak terlibat manajemen laba	(46)
	Jumlah sampel perusahaan diduga terlibat manajemen laba	71
Hipotesis 3		
1	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia	48
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan	0
3	Perusahaan dengan data variabel penelitian tidak lengkap	0
4	Perusahaan diduga tidak terlibat manajemen laba	(23)
	Jumlah sampel perusahaan diduga terlibat manajemen laba	25

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1, pengujian pertama (H1) menggunakan sampel perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia, dimana perusahaan yang sesuai dengan kriteria diduga terlibat manajemen laba adalah 96 perusahaan. Selanjutnya pada pengujian kedua (H2), dengan sampel perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia didapatkan 71 perusahaan yang diduga terlibat manajemen laba. Pengujian ketiga (H3) menggunakan sampel perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Malaysia dengan jumlah 25 perusahaan yang diduga terlibat manajemen laba.

Penentuan sampel perusahaan diduga terlibat manajemen laba (*suspect firm*) menggunakan kriteria Roychowdhury (2006) dan Cohen dkk (2007). Proses penentuan kriteria sampel mengeluarkan 1 perusahaan dari sampel penelitian karena tidak melaporkan laporan tahunan di tahun 2008 yaitu perusahaan Bank Ekonomi Raharja dari negara Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel pada hipotesis 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada lampiran 1. Kemudian perusahaan yang termasuk dalam *suspect firm*, dihitung *discretionary accruals* nya dengan menggunakan metode Beaver dan Engel (1996). Hasil perhitungan *DA* perusahaan sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran 2.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Data yang digunakan merupakan variabel dalam penelitian ini yaitu hasil perhitungan *discretionary accruals* (*DA*). Perhitungan *discretionary accruals* (*DA*) terdiri dari 3 pengujian yaitu *DA* dari sampel perusahaan perbankan sebelum dan sesudah *IAS 39* (*PSAK 55* dan *MFRS 139*) berlaku di Indonesia dan Malaysia. Kedua, *DA* sampel perusahaan perbankan sebelum dan sesudah *IAS 39* (*PSAK 55*) berlaku di Indonesia. Ketiga, *DA* sampel perusahaan perbankan sebelum dan sesudah *IAS 39* (*MFRS 139*) berlaku di Malaysia. Pada Tabel 4.2 berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Indonesia dan Malaysia

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA Indonesia dan Malaysia sebelum IAS 39 berlaku.	-0,10310	0,11662	-0,0002745	0,05844016
DA Indonesia dan Malaysia sesudah IAS 39 berlaku.	-0,13458	0,24966	-0,0002730	0,05747421

Sumber: Lampiran 3 (Data diolah)

Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai *discretionary accruals* (DA) di Indonesia dan Malaysia sebelum penerapan IAS 39 memiliki rata-rata -0,0002745 dan sesudah penerapan IAS 39 memiliki rata-rata -0,0002730. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* (penurunan laba), yang ditunjukkan oleh nilai negatif yang muncul pada nilai *mean*. Pola manajemen laba *income minimization* dapat digunakan dengan tujuan untuk menghindari pajak. Nilai rata-rata DA mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa sesudah penerapan IAS 39 manajemen laba tidak mengecil. Hal tersebut sejalan dengan nilai tertinggi DA yang juga mengalami peningkatan sesudah penerapan IAS 39, walaupun nilai terendah DA pada saat sebelum penerapan lebih besar daripada sesudah penerapan. Namun hasil ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjawab hipotesis H1 sebelum diketahui tingkat signifikansi perbedaan kedua variabel tersebut dalam pengujian *Independent t-test*.

Nilai DA terendah untuk sebelum dan sesudah penerapan IAS 39 adalah -0,10310 (tahun 2008) dan -0,13458 (tahun 2010) dimiliki oleh Bank Kesawan yang terdaftar di Indonesia. Secara berturut-turut Bank Kesawan mendapatkan nilai DA terendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Kesawan memiliki manajemen laba yang lebih kecil daripada sampel lainnya. Sedangkan Nilai DA tertinggi untuk sebelum dan sesudah penerapan IAS 39 adalah 0,11662 (2009) dan 0,24966 (2010) dimiliki oleh Bank Mandiri dan Bank

Agroniaga yang juga terdaftar di Indonesia. Nilai *DA* yang tinggi mengindikasikan manajemen laba yang tinggi.

Selanjutnya, pengujian statistik deskriptif dilakukan kembali pada nilai *discretionary accruals* (*DA*) perusahaan perbankan yang terdaftar di Indonesia.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Indonesia

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>DA</i> Indonesia sebelum <i>IAS</i> 39 (PSAK 55) berlaku.	-0,08001	0,12149	-0,0015026	0,05774333
<i>DA</i> Indonesia sesudah <i>IAS</i> 39 (PSAK 55) berlaku.	-0,11527	0,25951	-0,0002550	0,06431239

Sumber: Lampiran 3 (Data diolah)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa nilai *discretionary accruals* (*DA*) dengan sampel perbankan Indonesia sebelum penerapan *IAS* 39 (PSAK 55) memiliki rata-rata -0,0015026 dan sesudah penerapan *IAS* 39 (PSAK 55) memiliki rata-rata -0,0002550. Hasil rata-rata tersebut memiliki kesamaan dengan pengujian sebelumnya, dimana rata-rata perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* (penurunan laba). Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan perbankan di Indonesia dalam melakukan manajemen laba lebih memilih menggunakan pola *income minimization* yang dapat digunakan untuk menghindari pajak.

Selanjutnya, pada Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai rata-rata *DA* pada pengujian sebelum dan sesudah penerapan mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesudah penerapan *IAS* 39 (PSAK 55) manajemen laba tidak mengecil dan malah mengalami peningkatan, meskipun hanya sebesar 0,0012. Hal tersebut sejalan dengan nilai tertinggi *DA* yang juga mengalami peningkatan sesudah penerapan *IAS* 39 (PSAK 55), walaupun nilai terendah *DA* pada saat sebelum penerapan lebih besar daripada sesudah penerapan. Akan tetapi pengujian ini belum mampu menjawab hipotesis H2 sebelum diketahui tingkat signifikansi perbedaan kedua variabel tersebut pada pengujian *Independent t-test*.

Nilai *DA* terendah untuk sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39* (PSAK 55) adalah -0,08001 (2008) dan -0,11527 (2010) dimiliki oleh Bank Mayapada. Bank Mayapada secara berturut-turut mendapatkan nilai *DA* terendah, sehingga Bank Mayapada memiliki manajemen laba yang lebih kecil daripada sampel lainnya. Nilai *DA* tertinggi untuk sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39* (PSAK 55) adalah sebesar 0,12149 (2009) dan 0,25951 (2010) dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga. Nilai *DA* yang tinggi mengindikasikan manajemen laba yang tinggi.

Pengujian berikutnya merupakan statistik deskriptif untuk nilai *discretionary accruals* (*DA*) dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Malaysia.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Sampel Malaysia

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>DA</i> Malaysia sebelum <i>IAS 39</i> (<i>MFRS 139</i>) berlaku.	0,03854	0,29537	0,154363	0,08804797
<i>DA</i> Malaysia sesudah <i>IAS 39</i> (<i>MFRS 139</i>) berlaku.	0,08320	0,24124	0,1536473	0,04194937

Sumber: Lampiran 3 (Data diolah)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *discretionary accruals* (*DA*) dengan sampel Malaysia sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) memiliki rata-rata 0,154363 dan sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) memiliki rata-rata 0,1536473. Hasil rata-rata menunjukkan nilai positif sehingga rata-rata perusahaan perbankan di Malaysia melakukan manajemen laba dengan pola *income maximization* (peningkatan laba). Pola *income maximization* tersebut dapat dilakukan dengan tujuan bonus. Lebih lanjut lagi, Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata *DA* mengalami penurunan ketika *IAS 39* (*MFRS 139*) diterapkan. Meskipun penurunan yang terjadi sangat kecil yaitu sebesar 0,0007. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) lebih kecil daripada sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*). Namun, hal tersebut

belum mampu mengkonfirmasi hipotesis H3 sebelum diketahui tingkat signifikansi perbedaan kedua variabel tersebut.

Lebih lanjut lagi, nilai *DA* terendah untuk sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* adalah sebesar 0,03854 (2009) dan 0,08320 (2011). Nilai tersebut dimiliki oleh Bank Affin Syariah. Bank Affin Syariah mendapatkan nilai *DA* yang paling rendah baik sebelum maupun sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)*. Manajemen laba Bank Affin Syariah lebih kecil daripada sampel lainnya. Nilai *DA* tertinggi sebesar 0,29537 (2009) pada saat sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* dimiliki oleh Bank Islam Malaysia. Nilai *DA* tertinggi sebesar 0,24124 (2010) pada saat sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* dimiliki oleh Bank Islam RHB. Nilai *DA* yang tinggi mengindikasikan manajemen laba yang tinggi.

4.2.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah data penelitian yang digunakan telah terdistribusi normal. Data penelitian yang terdistribusi normal menjelaskan bahwa sampel penelitian yang digunakan dapat mewakili populasi yang ada. Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Tingkat signifikansi dikatakan terdistribusi normal jika lebih besar dari 0,05 dan tingkat signifikansi dikatakan tidak terdistribusi normal jika kurang dari 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

	Batas Signifikansi	Nilai <i>Asymp. Sig</i>	Keterangan
<i>DA</i> Indonesia dan Malaysia	0,05	0,084	NORMAL
<i>DA</i> Indonesia	0,05	0,359	NORMAL
<i>DA</i> Malaysia	0,05	0,713	NORMAL

Sumber: Lampiran 4 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa pengujian normalitas untuk variabel *DA* pada ketiga jenis sampel penelitian di atas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal. *DA* perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,084. Nilai *DA* dengan sampel

perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,359 dan *DA* dengan sampel perusahaan perbankan di Malaysia menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,713. Nilai *DA* dari ketiga jenis sampel memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 dan sampel penelitian terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, oleh karena itu pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan uji *Independent Sample T-test*.

4.2.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk *discretionary accruals* (*DA*) menggunakan *Independent Sample T-test* karena hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal. Lebih lanjut lagi, pengujian *Independent Sample T-test* dipilih karena sampel penelitian pada sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39* memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan tersebut diakibatkan penggunaan kriteria *suspect firm*. Hasil dari pengujian *Independent Sample T-test* akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis apakah manajemen laba sesudah menerapkan *IAS 39* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* pada perusahaan perbankan yang terdaftar dengan sampel Indonesia dan Malaysia. Pengujian *Independent Sample T-test* dilakukan tiga kali dengan jumlah dan jenis sampel yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil pengujian untuk hipotesis yang diajukan.

a) Hipotesis 1

Hipotesis 1 pada penelitian ini menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* di perusahaan perbankan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia yang telah terdaftar. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan pengujian secara statistik dengan *Independent Sample T-test*. Adapun hasil pengujian menggunakan *Independent Sample T-test* dapat diketahui pada Tabel berikut:

**Tabel 4.6. Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 1 dengan
*Independent Sample T-test***

	Mean	N
DA Indonesia dan Malaysia sebelum penerapan IAS 39	-0,000275	49
DA Indonesia dan Malaysia sesudah penerapan IAS 39	-0,000273	47

Sumber: Lampiran 5 (Data diolah)

Hasil pengujian *Independent Sample T-test* dengan sampel Indonesia dan Malaysia pada Tabel 4.6, diperoleh rata-rata *discretionary accruals* (DA) sebelum penerapan IAS 39 sebesar -0,000275 dan sesudah penerapan IAS 39 sebesar -0,000273. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata DA sesudah penerapan IAS 39 lebih besar daripada sebelum penerapan IAS 39. Lebih lanjut lagi, konfirmasi hipotesis 1 mengacu pada hasil pengujian uji beda *Independent Sample T-test* pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 1 dengan
*Independent Sample T-test***

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
DA	<i>Equal variances assumed</i>	1,170	0,282	1,000
	<i>Equal variances not assumed</i>			1,000

Sumber: Lampiran 5 (Data diolah)

Hasil pengujian dengan sampel Indonesia dan Malaysia, nilai *Levene test* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,282 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat signifikansi yang dilihat adalah angka *t-test Equal Variance Assumed*. Nilai *t-test* dari *Equal Variance Assumed* menunjukkan angka signifikansi 1,00. Adapun ketentuan pengambilan keputusan didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut.

Hipotesis:

H0 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.

H1 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.

Kriteria keputusan:

- a. Jika $\text{sig} > 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.
- b. Jika $\text{sig} < 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai *t-test* dari *Equal Variance Assumed* menunjukkan signifikansi 1,00. Sesuai dengan kriteria a, $1,00 > 0,05/2$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa H0 tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan.

b) Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan pengujian secara statistik dengan *Independent Sample T-test*. Adapun hasil pengujian menggunakan *Independent Sample T-test* dapat diketahui pada Tabel berikut:

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 2 dengan *Independent Sample T-test*

	Mean	N
DA Indonesia sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55)	-0,001503	39
DA Indonesia sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55)	-0,000255	32

Sumber: Lampiran 5 (data diolah)

Hasil pengujian *Independent Sample T-test* dengan sampel Indonesia pada Tabel 4.8, diperoleh rata-rata *discretionary accruals* (DA) sebelum penerapan IAS 39 sebesar -0,001503 dan sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) sebesar -0,000255. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata DA sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar daripada sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55). Lebih lanjut lagi, konfirmasi hipotesis 2 mengacu pada hasil pengujian uji beda *Independent Sample T-test* pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Hipotesis 2 dengan *Independent Sample T-test*

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
DA	<i>Equal variances assumed</i>	0,379	0,540	0,932
	<i>Equal variances not assumed</i>			0,932

Sumber: Lampiran 5 (Data diolah)

Hasil pengujian dengan sampel Indonesia, nilai *Levene test* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,540 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat signifikansi yang dilihat adalah angka *t-test Equal Variance Assumed*. Nilai *t-test* dari *Equal Variance Assumed* menunjukkan angka signifikansi 0,932. Adapun ketentuan pengambilan keputusan didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut.

Hipotesis:

- H0 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.
- H2 : Manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.

Kriteria keputusan:

- a) Jika $\text{sig} > 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.
- b) Jika $\text{sig} < 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) pada perusahaan perbankan di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai *t-test* dari *Equal Variance Assumed* menunjukkan signifikansi 0,932. Sesuai dengan kriteria a, $0,932 > 0,05/2$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa H_0 tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.

c) Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) di perusahaan perbankan Malaysia. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan pengujian secara statistik dengan *Independent Sample T-test*. Adapun hasil pengujian menggunakan *Independent Sample T-test* dapat diketahui pada Tabel berikut:

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Rata-rata Hipotesis 3 dengan *Independent Sample T-test*

	Mean	N
DA.Malaysia sebelum penerapan IAS 39 (<i>MFRS</i> 139)	0,154363	10
DA.Malaysia sesudah penerapan IAS 39 (<i>MFRS</i> 139)	0,153647	15

Sumber: Lampiran 5 (Data diolah)

Hasil pengujian *Independent Sample T-test* dengan sampel Malaysia pada Tabel 4.10, diperoleh rata-rata *discretionary accruals* (DA) sebelum penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) sebesar 0,154363 dan sesudah penerapan IAS 39 (*MFRS* 139)

sebesar 0,153647. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *DA* sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih kecil daripada sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)*. Lebih lanjut lagi, konfirmasi hipotesis 3 mengacu pada hasil pengujian uji beda *Independent Sample T-test* pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Hipotesis 3 dengan *Independent Sample T-test*

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
<i>DA</i>	<i>Equal variances assumed</i>	6,821	0,016	0,978
	<i>Equal variances not assumed</i>			0,981

Sumber: Lampiran 5 (Data diolah)

Hasil pengujian dengan sampel Malaysia, nilai *Levene test* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga tingkat signifikansi yang dilihat adalah angka *t-test Equal Variance Not Assumed*. Nilai *t-test* dari *Equal Variance Assumed* menunjukkan angka signifikansi 0,981.

Adapun ketentuan pengambilan keputusan didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut.

Hipotesis:

H0 : Manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.

H3 : Manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.

Kriteria keputusan:

- a. Jika $\text{sig} > 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.
- b. Jika $\text{sig} < 0,05/2$, maka manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* pada perusahaan perbankan di Malaysia.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai *t-test* dari *Equal Variance Not Assumed* menunjukkan signifikansi 0,981. Sesuai dengan kriteria a, $0,981 > 0,05/2$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa H_0 tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* di perusahaan perbankan Malaysia.

4.3 Pembahasan Hipotesis

IFRS merupakan standar yang diterapkan dengan tiga ciri utama yaitu berdasarkan prinsip (*principles based*), nilai wajar, dan pengungkapan. *IFRS* sebagai standar yang berbasis *principles based* akan mampu mempersempit aturan akuntansi sehingga dapat menurunkan celah pelanggaran (Cahyanti, 2011). Lebih lanjut lagi, *IFRS* sebagai standar yang menerapkan nilai wajar akan mampu meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan (Martani dkk, 2012:16). Pengungkapan sebagai salah satu ciri *IFRS* berguna dalam hal memantau aktifitas perusahaan, dimana ciri ini juga dianggap mampu mengurangi manajemen laba (Scott, 2009:426). Oleh karena itu standar *IFRS* diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan dengan memfokuskan pada standar *IAS 39* yang mengatur tentang instrumen keuangan. Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39*.

Namun hasil penelitian menunjukkan hal yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis (H_1) menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih kecil daripada manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39*

di perusahaan perbankan. Akan tetapi angka *Sig.(2-tailed) Equal Variance Assumed* menunjukkan angka 1,00 yang lebih besar dari 0,025 (0,05/2), sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 di perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis (H1) ditolak karena tidak didukung secara statistik.

Pengujian hipotesis (H2) juga menunjukkan bahwa hipotesis (H2) tersebut ditolak secara statistik. Hal tersebut dikarenakan nilai *Sig.(2-tailed) Equal Variance Assumed* menunjukkan angka 0,932 yang lebih besar dari 0,025 (0,05/2), sehingga manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada pengujian dengan sampel perbankan di Malaysia. Nilai *Sig.(2-tailed) Equal Variance Not Assumed* menunjukkan angka 0,981 yang lebih besar dari 0,025 (0,05/2), sehingga hipotesis (H3) ditolak karena hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) di perusahaan perbankan Malaysia. Secara konsisten, hasil pengujian H1, H2, dan H3 menunjukkan hasil yang sama yaitu manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39. Oleh karena itu, secara statistik ketiga hipotesis tersebut ditolak.

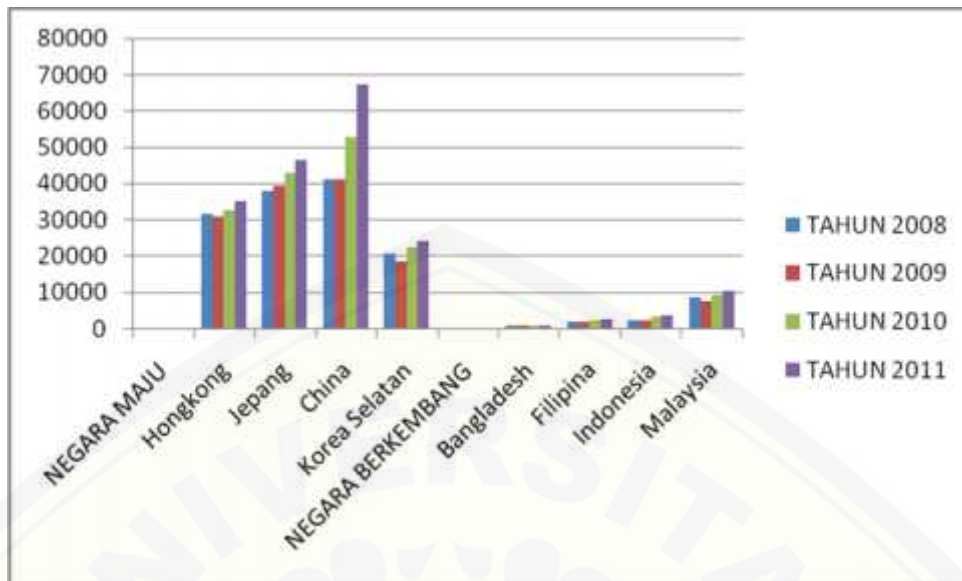
Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Barth dkk (2007), Rohaeni dan Aryati (2012), Sellami dan Fakhfakh (2014), dan Khoo dkk (2015), yang menemukan bahwa manajemen laba menurun setelah penerapan IFRS. Lebih jauh lagi, Anggraita (2012) dan Nurazmi dkk (2015) menemukan bukti bahwa manajemen laba menurun setelah penerapan IAS 39.

Akan tetapi hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian Jeanjean dan Stolowy (2008) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berkurang setelah adopsi IFRS, dan bahkan pengujian dengan sampel negara Perancis menunjukkan manajemen laba meningkat. Begitu juga dengan Senjani (2013),

dengan sampel perusahaan di negara Uni Eropa menunjukkan bahwa perusahaan masih tetap melakukan praktik manajemen laba akrual meskipun mereka telah menggunakan *IFRS*. Begitu juga dengan hasil pengujian Pratama dan Ratnaningsih (2014) menemukan bukti bahwa kualitas laba tidak meningkat setelah adopsi *IAS 39*.

Sebagaimana kita ketahui, *IASB* sebagai pencetus *IFRS* merupakan sebuah *standard setter* dengan anggota yang sebagian besar dari negara maju (Santy dan Pontoh, 2012). Hal tersebut memungkinkan *IFRS* tidak diimplementasikan secara efektif karena adanya perbedaan karakteristik antara negara maju dan berkembang. Perbedaan karakteristik tersebut bisa dalam bentuk perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal (Zeghal dan Mhedhbi, 2006). Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan sistem akuntansi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka fungsi akuntansi sebagai alat pengukuran dan bahasa bisnis menjadi penting (Zeghal dan Mhedhbi, 2006). Lebih lanjut lagi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diimbangi dengan aktifitas bisnis yang kompleks (Zeghal dan Mhedhbi, 2006). Hal tersebut mengarah pada kebutuhan standar yang berkualitas dan diakui secara internasional seperti *IFRS*.

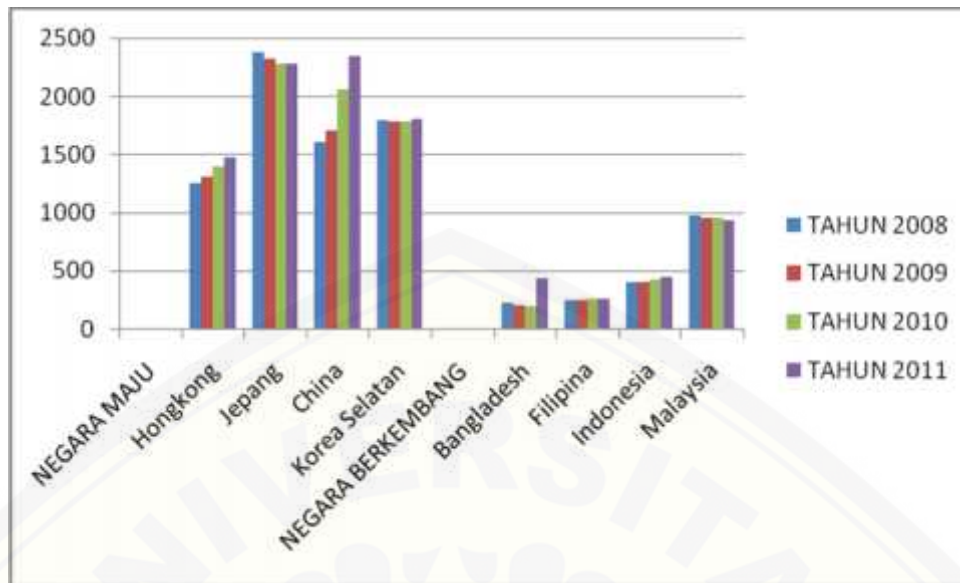
Gambar 4.1 memperlihatkan perbandingan data pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju dan berkembang di Asia pada tahun 2008-2011. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat GDP per kapita dalam US\$ (data.worldbank.org diakses pada tanggal 04-11-2016). Berdasarkan Gambar 4.1 dapat kita ketahui bahwa perbandingan pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang jauh berbeda. Hal ini menjadi faktor munculnya perbedaan keefektifan penerapan *IFRS*. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin kompleks pula aktifitas bisnisnya, sehingga kebutuhan akan standar yang berkualitas juga sangat besar. Oleh karena itu, tak heran bila penerapan *IFRS* lebih efektif diterapkan pada negara maju daripada negara berkembang.



Gambar 4.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang

Perbedaan karakteristik berikutnya adalah perkembangan pasar modal. Keberadaan pasar modal di suatu negara akan mendorong negara tersebut menerapkan standar akuntansi yang baik dalam upaya untuk menjamin kualitas informasi yang berguna bagi investor (Zeghal dan Mhedhbi, 2006). Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin berkembang pasar modal suatu negara maka kebutuhan standar layaknya *IFRS* akan semakin tinggi. Pada Gambar 4.2 memperlihatkan data perbandingan perkembangan pasar modal beberapa negara maju dan berkembang di Asia tahun 2008-2011. Perkembangan pasar modal diukur dengan menggunakan indikator jumlah perusahaan lokal yang *listing* (data.worldbank.org diakses pada tanggal 04-11-2016).

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan lokal yang *listing* di negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang. Perkembangan pasar modal yang berbeda antara negara maju dan berkembang, akan menunjukkan tingkat perhatian yang berbeda terhadap perlunya sistem akuntansi yang berkualitas dalam hal ini *IFRS*. Hal ini menjadi salah satu faktor latarbelakang perbedaan keefektifan penerapan *IFRS* di negara maju dan berkembang.



Gambar 4.2. Perbandingan Perkembangan Pasar Modal Negara Maju dan Berkembang

Ketidakefektifan penerapan *IFRS* di negara berkembang dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, memungkinkan tujuan *IFRS* tidak tercapai. Salah satunya yang terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga penerapan *IFRS* tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba.

Salah satu ciri *IFRS* merupakan penggunaan nilai wajar. Berdasarkan tujuannya, penggunaan nilai wajar diharapkan mampu meningkatkan relevansi informasi akuntansi. Namun dalam praktiknya, terdapat kritik terkait dengan penentuan nilai wajar. Krumwiede (2008) memaparkan bahwa penentuan nilai wajar menggunakan estimasi, sehingga manajemen dengan niat baik sekalipun dapat mengalami kesalahan akibat ketidakmampuan dalam memprediksi dan memberikan asumsi yang tepat. Selain itu, Krumwiede (2008) menambahkan bahwa penggunaan nilai wajar melalui estimasi dan asumsi manajemen dapat dimanfaatkan bagi pihak manajemen yang tidak jujur dan memiliki sikap oportunistik untuk mengambil keuntungan pribadi. Sehingga tingkat manajemen laba sesudah penerapan *IFRS* belum tentu lebih kecil daripada sebelum penerapan *IFRS*.

IAS 39 (Indonesia: *PSAK 55*; Malaysia: *MFRS 139*) merupakan sebuah standar yang dianggap kontroversial bila diimplementasikan pada industri

perbankan karena keharusan penggunaan akuntansi *fair value* untuk semua instrumen derivatif, sehingga menyulitkan dalam hal pengakuan dan pengukurannya (Adzis, 2012). Lebih lanjut lagi, penentuan reklasifikasi yang ketat memang dianggap mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, penentuan CKPN dianggap masih memberikan celah dalam manajemen laba (Anggraita, 2012). Penurunan nilai piutang dalam hal ini CKPN memang dapat dilakukan jika terdapat bukti obyektif. Namun, beberapa indikator penurunan nilai masih mengandung unsur *judgement* yaitu penentuan penurunan nilai dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan. Lebih lanjut lagi, indikator yang mengandung unsur subyektifitas juga digunakan yaitu penentuan penurunan nilai dengan pemberian restrukturisasi atau keringanan (konsesi) oleh pihak manajemen akibat pihak peminjam mengalami kesulitan.

Anggraita (2012) menambahkan bahwa penentuan CKPN pada IAS 39 mengandung unsur penilaian (*judgement*) yang tinggi, sehingga penentuan CKPN dapat menjadi alat alternatif dalam melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan IAS 39. Selain itu, waktu diwajibkannya IAS 39 di Indonesia dan Malaysia masih baru yaitu tahun 2010. Waktu pengamatan penelitian hanya 2 tahun setelah diterapkan sehingga terdapat kemungkinan IAS 39 belum diterapkan secara efektif dan masih memungkinkan besarnya tingkat manajemen laba yang dilakukan.

Penemuan menarik ditemukan melalui pengujian statistik deskriptif untuk pengujian terpisah antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan statistik deskriptif di negara Indonesia, ditemukan bukti manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (PSAK 55) lebih besar daripada sebelum penerapan IAS 39 (PSAK 55). Sebaliknya, hasil pengujian statistik deskriptif di negara Malaysia menunjukkan bukti manajemen laba sesudah penerapan IAS 39 (*MFRS* 139) lebih kecil daripada sebelum penerapan IAS 39 (*MFRS* 139).

Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antara Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Sistem hukum di Indonesia bersifat *civil*

law sedangkan Malaysia bersifat *common law* (Wardhani, 2009; Leuz dkk, 2003). Hasil penelitian terdahulu oleh La Porta dkk (1996) dan Leuz dkk (2003) menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum *common law* memiliki proteksi yang lebih terhadap investor daripada negara dengan sistem hukum *civil law*. Semakin baik proteksi bagi investor disuatu negara maka semakin rendah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan (Leuz dkk (2002); Wardhani (2009). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Houqe dkk (2011) yang menyatakan bahwa kualitas laba meningkat untuk negara yang mengadopsi *IFRS* secara *mandatory* ketika negara tersebut memiliki proteksi investor yang kuat.

Lebih lanjut lagi, jika membandingkan hasil pengujian nilai *mean* Indonesia dan Malaysia, terdapat perbedaan didalamnya. Berikut ini akan ditampilkan perbandingan nilai *mean* pada pengujian *Independent Sample T-test* untuk negara Indonesia dan Malaysia.

Tabel 4.12. Perbandingan *Mean* Indonesia dan Malaysia

Negara	<i>Mean</i> sebelum	<i>Mean</i> sesudah
Indonesia	-0,001503	-0,000255
Malaysia	0,154363	0,153647

Sumber: Lampiran 5 (Data dioalah)

Nilai *mean* Indonesia baik sebelum maupun sesudah menunjukkan angka negatif. Hal tersebut menandakan bahwa manajemen laba cenderung dilakukan dengan pola *income minimization*. Salah satu motivasi perusahaan melakukan *income minimization* adalah mengecilkan pajak (Scott, 2009:405). Kecenderungan tersebut juga dibuktikan oleh hasil penelitian Nurshofyani dkk (2016), yang menunjukkan bahwa manajemen laba di Indonesia memiliki pola *income minimization*.

Berbeda dengan Malaysia, hasil pengujian *mean* sebelum dan sesudah menunjukkan angka positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba di Malaysia cenderung dilakukan dengan pola *income maximization*. *Income maximization* dapat dilakukan untuk tujuan menghindari pelaporan kerugian (Scholer, 2005). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasim dkk (2013), yang

menunjukkan bahwa motivasi tertinggi dilakukannya manajemen laba di Malaysia adalah *Altruistic motivation*. *Altruistic motivation* merupakan motivasi manajemen laba yang bertujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan, salah satunya dengan menghindari pelaporan kerugian (Hasim dkk, 2013).



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis mengenai pengaruh penerapan *IAS 39* (tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan: perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini dilakukan dengan menguji manajemen laba (*discretionary accruals*) sebelum dan sesudah penerapan *IAS 39* di Indonesia dan Malaysia (H1), dimana pengujian secara terpisah juga dilakukan pada Indonesia dan Malaysia (H2) dan (H3). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis (H1) tidak diterima atau (H0) tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* di perusahaan perbankan.
2. Hipotesis (H2) tidak diterima atau (H0) tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (PSAK 55) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (PSAK 55) di perusahaan perbankan Indonesia.
3. Hipotesis (H3) tidak diterima atau (H0) tidak berhasil ditolak yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39* (*MFRS 139*) di perusahaan perbankan Malaysia.

Terlepas dari hipotesis yang tidak terbukti secara signifikan, penelitian ini menemukan bukti yang menarik melalui pengujian statistik deskriptif dan perbandingan nilai mean pada uji *Independent Sample T-test*. Penemuan tersebut berkaitan dengan pengujian terpisah antara Indonesia dan Malaysia. Pengujian statistik deskriptif di Indonesia, menemukan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* (PSAK 55) lebih besar daripada sebelum penerapan *IAS 39* (PSAK 55). Pengujian statistik deskriptif di Malaysia menemukan bahwa

manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39 (MFRS 139)* lebih kecil daripada sebelum penerapan *IAS 39 (MFRS 139)*. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antara Indonesia dan Malaysia. Sistem hukum di Indonesia bersifat *civil law* sedangkan Malaysia bersifat *common law*. Negara dengan sistem hukum *common law* memiliki proteksi yang lebih terhadap investor daripada negara dengan sistem hukum *civil law*, sehingga semakin baik proteksi bagi investor disuatu negara maka semakin rendah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Nilai *mean* variabel *discretionary accruals* pada pengujian *Independent Sample T-test* menunjukkan angka negatif pada Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa manajemen laba di Indonesia cenderung dilakukan dengan pola *income minimization*. Sebaliknya, rata-rata nilai *DA* di Malaysia menunjukkan angka positif sehingga menandakan bahwa manajemen laba di Malaysia cenderung dilakukan dengan pola *income maximization*.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi berikut:

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum *IAS 39* pada perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia. Pengujian secara terpisah antara Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan hasil yang serupa. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong akademisi untuk melakukan pengujian lanjutan sehingga dihasilkan pengujian empiris yang lebih kuat dan mampu menjelaskan terkait dampak penerapan *IAS 39* terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi dan masukan terkait dengan penggunaan kriteria *suspect firm* dalam penentuan sampel penelitian. Penggunaan kriteria *suspect firm* akan mampu meningkatkan kekuatan dan kepercayaan dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu terkait topik ini belum ada peneliti yang menambahkan kriteria tersebut dalam *purposive sample* nya.

b) Bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya

Penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan *IAS 39* tidak memberikan penurunan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan perbankan, sehingga dapat menjadi saran bagi investor untuk mengambil keputusan terkait dengan investasi pada perusahaan perbankan.

c) Bagi perbankan

Hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam standar akuntansi sehingga perusahaan perbankan masih dapat melakukan manajemen laba meskipun telah menerapkan *IAS 39*. Celah tersebut berkaitan dengan aturan dalam *IAS 39* yang mengatur mengenai penurunan nilai piutang (CKPN) yang masih mengandung unsur *judgement* dan subyektifitas. Oleh karena itu, diharapkan pihak perusahaan dapat menghindari pemanfaatan celah tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

d) Bagi regulator

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba sesudah penerapan *IAS 39* lebih besar atau sama dengan manajemen laba sebelum penerapan *IAS 39*. Hasil tersebut dapat mendorong pihak regulator untuk memaksimalkan penerapan *IAS 39* bagi perusahaan sehingga tujuan *IFRS* terkait dengan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

- a) Penelitian ini hanya menggunakan obyek perusahaan di Indonesia dan Malaysia, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi lebih luas.
- b) Standar *IFRS* yang menjadi variabel penelitian hanya terbatas pada penerapan *IAS 39*.

5.4 Saran Penelitian

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang dikemukakan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.

- a) Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian tidak hanya Indonesia dan Malaysia, agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi lebih luas.
- b) Standar *IFRS* terdiri dari banyak aturan, hendaknya penelitian selanjutnya tidak hanya menilai penerapan *IAS 39* tetapi juga menambahkan standar lainnya yang juga berlaku di suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Adzis, A. (2012). The Impact Of International Financial Reporting Standards (IFRS) On Bank Loan Loss Provisioning Behaviour And Bank Earnings Volatility. Disertasi. *Banking Studies Massey University*.
- Anggraita, V. (2012). Dampak Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) Terhadap Manajemen Laba di Perbankan: Peranan Mekanisme *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin*.
- Aprilicia, V. (2013). Road Map International Financial Reporting Standard (IFRS) dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal JIBEKA Volume 7, No. 3: 60-64*.
- Arieftiara, D. (2013). Pengaruh PSAK No. 55 (Revisi 2006): Pengakuan Dan Pengukuran Instrumen Keuangan, Terhadap *EarningsInformativeness* Dan Kemampuan Pasar Dalam Memprediksi Laba Mendatang. *Surabaya: Universitas Negeri Surabaya*.
- Barth, M., Landsman, W dan Lang, M. (2007). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research, 46(3), 467-498*.
- Beaver, W.H., dan Engel, E.E. (1996). Discretionary Behavior with Respect to Allowancesfor Loan Losses and the Behavior of Security Prices. *Journal of Accounting and Economics 22 (1996) 177-206*.
- Cahyati, A. D.(2011). Peluang Manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Empiris.*Jurnal Riset Akuntansi Komputerasi Akuntansi, Vol 2, No.1 Januari 2011*.

- Cai, L., Asheq, R. dan Courtenay, S. (2008). The Effect of IFRS and its Enforcement on Earnings Management: An International Comparison. *Social Science Research Network Electronic Paper Collection*.
- Choi, Frederick D. S, dan Meek, Gary K. (2012). International Accounting Edisi 6. *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Cohen, Daniel, A., Dey, Aiyesha, dan Thomas Z Lys. (2007). Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. *The Accounting Review Vol. 83. No. 3, pp. 757-787*.
- Delves, D dan Patrick, B. (2010). Agency theory summary. http://www.delvesgroup.com/wp-content/uploads/2010/08/Agency-theory-summary_delves-Patrick.pdf.
- Febriyanti, A, Sawarjuwono, T, dan Pratama, B. (2014). Manajemen Laba: Pro-Kontra Pemaknaan Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Proses Pembiayaan Kredit. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.16, No. 1, Maret 2014: 55-68*.
- Fischer, M, dan Rosenzweig, K. (1995). Attitude of Students and Accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of Earnings Management. *Journal of Business Ethics. Vol. 14. p. 433-444*.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Greuning H.V, Scott D, dan Terblanche S. (2013). International Financial Reporting Standards (Ed.6). *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Gumanti, T. A. (2000). Earnings Management : Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 2, No. 2, November 2000: 104-115*.

- Hanefah, H dan Singh, J. (2012). Convergence Toward IFRS In Malaysia: Issues, Challenges, And Opportunities. *International Journal Of Business and Law Vol. 1 ISSN: 2289-1552*.
- Hassan, M dan Saleh, N. (2010). The Value Relevance of Financial Instruments Disclosure In Malaysian Firm Listed In The Main Board of Bursa Malaysia. *International Journal of Economic and Management 4(2): 243-270 ISSN: 1823-836X. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia*.
- Hashim, H, Salleh, Z, dan Ariff, A. (2013). The Underlying Motives for Earning Management: Director's Perspective. *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 5*.
- Healy, P.M., dan Wahlen, JM. (1999). A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons, Vol. 13 No. 4, pp. 365-383*.
- Houqe, N.M, Zijl, T. V, Dunstan, K, dan Karim, W.(2011). The effect of IFRS Adoption and Investor Protection on Earnings Quality around the World. *Working Paper*.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, B. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. *BPFE: Yogyakarta*.
- Jeanjean, T, dan Stolowy, H. (2008). Do Accounting Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings Management Before and After IFRS Adoption. *Journal of Accounting and Public Policy, 27, 480-494*.
- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior: Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*.

- Kassem, R. (2012). Earnings Management and Financial Reporting Fraud: Can External Auditors Spot the Difference?. *American Journal of Business and Management Vol.1, No. 1, 2012, 30-33.*
- Kho, P dan Zaluki, N. (2015). IFRS Convergence and Earnings Management. *Pertanika J Social Science & Hum 23(S): 75-84.*
- Krumwiede, T. (2008). Why Historical Cost Accounting Makes Sense. *www.thefreelibrary.com*. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- La Porta, R, Silanes, F, Shleifer, A, dan Vishny, R. (1996). Law and Finance. *NBER Working Paper National Bureau of Economic Research.*
- Lestari, Y.O. (2013). Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS dan Manajemen Laba di Indonesia. *Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*
- Leuz, C, Nanda, D, dan Wysocki, P. (2003). Investor Protection An Earning Management: An International Comparison. *Journal of Financial Economic 69.*
- Malaysian Institute Of Accountants. (2010). Financial Instruments The Acclaimed Mother of All Standards. *Dikeluarkan sebagai panduan bagi akademisi dan pengguna lainnya. Malaysia: Malaysian Institute Of Accountants.*
- Martani, D, Veronica, S, Wardhani, R, Farahmita, A, dan Tanujaya E. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1. *Jakarta: Penerbit Salemba Empat.*
- Merchant, Kenneth, A dan Joanne, Rockness.(1994). The Ethics of Managing Earning: An Empirical Investigation. *Journal of Accounting and Public Policy. pp. 79-94.*

- Narendra dan Haryanto, A dan Haryanto (2013). Pengaruh Pengadopsian International Financial Reporting Standard (IFRS) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- NN. www.mia.org.my/at/at/200810/06.pdf. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2015.
- NN. [http://www.iasplus.com/en/standards/ias/IAS 39](http://www.iasplus.com/en/standards/ias/IAS_39). Diakses pada tanggal 31 Januari 2016.
- Nuha, Wahyuni, dan Irmadariyani. (2014). Perbedaan Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan yang Diduga Melakukan Manipulasi Laba Akrua dan Manipulasi Laba Real. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII Mataram*.
- Nurshofyani, A, Pribadi, F, dan Surwanti, A. (2016). Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Bank di Indonesia. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ISBN: 978-602-19568-2-3*.
- Nurazmi, Handajani, dan Effendy. (2015). Dampak Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba serta Peran Mekanisme Corporate Governance pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII Medan*.
- Pratama, Y, dan Ratnaningsih, D. (2014). Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi International Accounting Standards (IAS) 39 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya*.
- Qomariah, R dan Marsono. (2013). Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Struktur Kepemilikan Manajerial Sebagai

Variabel Moderating. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.

Rahmawati. (2007). Model Pendekteksian Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol XVIII, No 1, April 2002. Hal 23-34.*

Rohaeni dan Aryati. (2012). Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Income Smoothing Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin.*

Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics 42: 335-370.*

Rudra, T. dan Bhattacharjee, D. (2012). Does IFRS Influence Earnings Management? Evidence from India. *Journal of Management Research 4(1):1-13.*

Santoso, S. (2001). Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik. *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.*

Santy, P.T, dan Pontoh, G.T. (2012). Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia, *Working Paper.*

Saputra, B. B. (2013). Analisis Perbedaan Kualitas Laba Sebelum Dan Sesudah Adopsi IAS 39 (2005) Menjadi PSAK 55 (2006) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2008-2011. *Jurnal Universitas Atmajaya.*

Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Managements. *Accounting Horizons, 3, 91-102.*

- Scholer, F. (2005). Earning Management to Avoid Earnings Decrease and Losses. *Financial Reporting Research Group Working Paper R-2005-03*.
- Scott, William R. (2009). *Financial Accounting Theory. Fifth Edition. Canada Prentice Hall*.
- Sellami, M, dan Fakhfakh, H.(2013). Effect of the mandatory adoption of IFRS on Real and Accruals-Based Earnings Management: Empirical Evidence from France. *International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol.2, No.1*.
- Senjani, Y. (2013). Manajemen Laba AkruaI dan Riil Sebelum dan Setelah Adopsi Wajib IFRS di Uni Eropa. *Jurnal Etikonomi, Vol. 12, No. 1*.
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara*.
- Sulistiyanto, Sri. (2008). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. Jakarta: PT. Grasindo*.
- The, H., Ng, S., Ong, T., dan Soh, W. (2013). The Impact Of Financial Reporting Standard 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement On Audit Fees. *Medwell Journal The Social Sciences 8 (6): 610-617 ISSN: 1818-5800. Malaysia: Universiti Putra Malaysia*.
- Wahyuni, Nining Ika. (2013). Pewaktuan Manajemen Laba Riel dan Kaitannya Dengan Perataan Laba Serta Persistensi Laba. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.11, No.2*.
- Wardhani, R. (2009). Pengaruh Proteksi Bagi Investor, Konvergensi Standar Akuntansi, Implementasi Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laba: Analisis Lintas Negara di Asia. Disertasi. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.

- Watts, R, L., dan Zimmerman, J, L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New York, Prentice Hall.
- Webster dan Thompson. (2005). *Earnings Quality Under Rules Vs Principle Based : A Test Of Skinner Hypotesis*. *www.ssrn.com*.
- Widiyanti, N. (2012). *Peranan IFRS Terhadap Peningkatan Kualitas Informasi Akuntansi: Arah, Peluang, dan Tantangan Penelitian Akuntansi. Paper diseminarkan dalam Seminar Penelitian Akuntansi: Tantangan dan Peluang. Jember: Universitas Jember.*
- Wolk, H, Tearney, M, dan Dodd, J, L. (2006). *Accounting Theory Edisi 6*. New York: Thomson South Western.
- Zamzami. (2011). *Perkembangan Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia. Hasil Diskusi Pelatihan Internasional "TOT" untuk IFRS dan Penyusunan Kamus Akuntansi Indonesia. Yogyakarta: Penelitian dan Pelatihan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.*
- Zeghal, D dan Mhedhbi, K. (2006). *An Analysis of The Factors Affecting The Adoption of International Accounting Standards by Developing Countries. The International Journal of Accounting 41(2006)373-386.*

Lampiran 1

SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2008	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Bumi Putera Indonesia
6	Bank Capital Indonesia
7	Bank Central Asia
8	Bank Himpunan Saudara 1906
9	Bank Internasional Indonesia
10	Bank Kesawan
11	Bank Mandiri
12	Bank Mayapada
13	Bank Negara Indonesia
14	Bank OCBC NISP
15	Bank Rakyat Indonesia
16	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
17	Bank Windu Kentjana International
18	Affin Syariah Bank
19	AMMB Bank
20	Hong Leong Bank
21	Public Bank
22	RHB Capital

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 1)**

TAHUN 2009	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia
6	Bank Central Asia
7	Bank Danamon Indonesia
8	Bank Ekonomi Raharja
9	Bank ICB Bumiputera
10	Bank Kesawan
11	Bank Mandiri (Persero)
12	Bank Mayapada
13	Bank Mega
14	Bank Nusantara Parahyangan
15	Bank OCBC NISP
16	Bank Pan Indonesia
17	Bank Permata
18	Bank Rakyat Indonesia
19	Bank Tabungan Negara
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
21	Bank Victoria International
22	Bank Windu Kentjana International
23	Affin Bank
24	Affin Syariah Bank
25	Bank Islam Malaysia
26	RHB Capital
27	Hong Leong Bank

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 1)**

TAHUN 2010	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia
6	Bank Central Asia
7	Bank ICB Bumiputera
8	Bank Kesawan
9	Bank Mandiri
10	Bank Mayapada
11	Bank Nusantara Parahyangan
12	Bank Pan Indonesia
13	Bank Sinarmas
14	Bank Windu Kentjana International
15	BPD Jawa Barat dan Banten
16	Affin Bank
17	Affin Syariah Bank
18	Alliance Bank
19	AMMB Bank
20	Hong Leong Bank
21	Public Bank
22	RHB Capital
23	RHB Islamic Bank

Lampiran 1

SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2011	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia
6	Bank CIMB Niaga
7	Bank Danamon Indonesia
8	Bank Internasional Indonesia
9	Bank Mega
10	Bank Mutiara
11	Bank Nusantara Parahyangan
12	Bank Permata
13	Bank QNB Kesawan
14	Bank Sinarmas
15	Bank Tabungan Negara
16	Bank Windu Kentjana International
17	BPD Jawa Barat dan Banten
18	Affin Bank
19	Affin Syariah Bank
20	Alliance Bank
21	Hong Leong Bank
22	Public Bank
23	RHB Capital
24	RHB Islamic Bank

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 2)**

TAHUN 2008	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Bumi Putera Indonesia
6	Bank Capital Indonesia
7	Bank Central Asia
8	Bank Himpunan Saudara 1906
9	Bank Internasional Indonesia
10	Bank Kesawan
11	Bank Mandiri
12	Bank Mayapada
13	Bank Negara Indonesia
14	Bank OCBC NISP
15	Bank Rakyat Indonesia
16	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
17	Bank Windu Kentjana International

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 2)**

TAHUN 2009	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia
6	Bank Central Asia
7	Bank Danamon Indonesia
8	Bank Ekonomi Raharja
9	Bank ICB Bumiputera
10	Bank Kesawan
11	Bank Mandiri
12	Bank Mayapada
13	Bank Mega
14	Bank Nusantara Parahyangan
15	Bank OCBC NISP
16	Bank Pan Indonesia
17	Bank Permata
18	Bank Rakyat Indonesia
19	Bank Tabungan Negara
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
21	Bank Victoria International
22	Bank Windu Kentjana International

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 2)**

TAHUN 2010	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia.
6	Bank Central Asia
7	Bank ICB Bumiputera
8	Bank Kesawan
9	Bank Mandiri
10	Bank Mayapada
11	Bank Nusantara Parahyangan.
12	Bank Pan Indonesia
13	Bank Sinarmas
14	Bank Windu Kentjana International
15	BPD Jawa Barat dan Banten

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 2)**

TAHUN 2011	
No	Nama Perusahaan
1	Bank Agroniaga
2	Bank Artha Graha Internasional
3	Bank Bukopin
4	Bank Bumi Artha
5	Bank Capital Indonesia
6	Bank CIMB Niaga
7	Bank Danamon Indonesia
8	Bank Internasional Indonesia
9	Bank Mega
10	Bank Mutiara
11	Bank Nusantara Parahyangan
12	Bank Permata
13	Bank QNB Kesawan
14	Bank Sinarmas
15	Bank Tabungan Negara
16	Bank Windu Kentjana International
17	BPD Jawa Barat dan Banten

Lampiran 1**SAMPEL PENELITIAN (HIPOTESIS 3)**

TAHUN 2008	
No	Nama Perusahaan
1	Affin Syariah Bank
2	AMMB Bank
3	Hong Leong Bank
4	Public Bank
5	RHB Capital

TAHUN 2009	
No	Nama Perusahaan
1	Affin Bank
2	Affin Syariah Bank
3	Bank Islam Malaysia
4	RHB Capital
5	Hong Leong Bank

Lampiran 1

SAMPSEL PENELITIAN (HIPOTESIS 3)

TAHUN 2010	
No	Nama Perusahaan
1	Affin Bank
2	Affin Syariah Bank
3	Alliance Bank
4	AMMB Bank
5	Hong Leong Bank
6	Public Bank
7	RHB Capital
8	RHB Islamic Bank

TAHUN 2011	
No	Nama Perusahaan
1	Affin Bank
2	Affin Syariah Bank
3	Alliance Bank
4	Hong Leong Bank
5	Public Bank
6	RHB Capital
7	RHB Islamic Bank

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2008		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	-0,07014
2	Bank Artha Graha Internasional	-0,02751
3	Bank Bukopin	0,03220
4	Bank Bumi Artha	-0,07227
5	Bank Bumi Putera Indonesia	0,00580
6	Bank Capital Indonesia	-0,07079
7	Bank Central Asia	-0,00858
8	Bank Himpunan Saudara 1906	-0,00966
9	Bank Internasional Indonesia	-0,02492
10	Bank Kesawan	-0,10310
11	Bank Mandiri	0,09423
12	Bank Mayapada	-0,05379
13	Bank Negara Indonesia	0,03954
14	Bank OCBC NISP	-0,02391
15	Bank Rakyat Indonesia	0,10438
16	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	0,02291
17	Bank Windu Kentjana International	-0,03188
18	Affin Syariah Bank	-0,01555
19	AMMB Bank	0,06285
20	Hong Leong Bank	-0,00308
21	Public Bank	-0,00500
22	RHB Capital	0,11025

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2009		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,10541
2	Bank Artha Graha Internasional	-0,02704
3	Bank Bukopin	-0,00765
4	Bank Bumi Artha	-0,02803
5	Bank Capital Indonesia	-0,03374
6	Bank Central Asia	0,05100
7	Bank Danamon Indonesia	-0,07153
8	Bank Ekonomi Raharja	-0,01265
9	Bank ICB Bumiputera	-0,00013
10	Bank Kesawan	-0,06007
11	Bank Mandiri (Persero)	0,11662
12	Bank Mayapada	-0,00964
13	Bank Mega	-0,06744
14	Bank Nusantara Parahyangan	-0,02984
15	Bank OCBC NISP	0,03300
16	Bank Pan Indonesia	-0,08840
17	Bank Permata	0,09059
18	Bank Rakyat Indonesia	0,11603
19	Bank Tabungan Negara	-0,02949
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	-0,01588
21	Bank Victoria International	0,02905
22	Bank Windu Kentjana International	-0,05505
23	Affin Bank	-0,05577
24	Affin Syariah Bank	-0,02914
25	Bank Islam Malaysia	0,04271
26	RHB Capital	0,08299
27	Hong Leong Bank	-0,01134

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2010		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,24966
2	Bank Artha Graha Internasional	0,01306
3	Bank Bukopin	0,03564
4	Bank Bumi Artha	-0,06968
5	Bank Capital Indonesia	-0,08214
6	Bank Central Asia	-0,00588
7	Bank ICB Bumiputera	-0,06995
8	Bank Kesawan	-0,13458
9	Bank Mandiri	0,04862
10	Bank Mayapada	-0,09652
11	Bank Nusantara Parahyangan	-0,03924
12	Bank Pan Indonesia	-0,02084
13	Bank Sinarmas	0,00121
14	Bank Windu Kentjana International	0,02648
15	BPD Jawa Barat dan Banten	-0,00256
16	Affin Bank	-0,01186
17	Affin Syariah Bank	-0,01555
18	Alliance Bank	0,06208
19	AMMB Bank	0,03732
20	Hong Leong Bank	-0,00818
21	Public Bank	0,00205
22	RHB Capital	0,04508
23	RHB Islamic Bank	0,06397

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 1)

TAHUN 2011		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,07892
2	Bank Artha Graha Internasional	0,04681
3	Bank Bukopin	0,00545
4	Bank Bumi Artha	-0,02062
5	Bank Capital Indonesia	-0,02705
6	Bank CIMB Niaga	0,04370
7	Bank Danamon Indonesia	0,00223
8	Bank Internasional Indonesia	-0,02902
9	Bank Mega	-0,03103
10	Bank Mutiara	-0,03735
11	Bank Nusantara Parahyangan	-0,06169
12	Bank Permata	-0,00377
13	Bank QNB Kesawan	-0,03136
14	Bank Sinarmas	-0,03356
15	Bank Tabungan Negara	-0,00185
16	Bank Windu Kentjana International	-0,02881
17	BPD Jawa Barat dan Banten	-0,00656
18	Affin Bank	-0,00045
19	Affin Syariah Bank	-0,00025
20	Alliance Bank	0,04732
21	Hong Leong Bank	0,01639
22	Public Bank	-0,03406
23	RHB Capital	0,03480
24	RHB Islamic Bank	0,03079

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 2)**TAHUN 2008**

NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	-0,04536
2	Bank Artha Graha Internasional	-0,02840
3	Bank Bukopin	0,02338
4	Bank Bumi Artha	-0,06630
5	Bank Bumi Putera Indonesia	0,00617
6	Bank Capital Indonesia	-0,05383
7	Bank Central Asia	0,01916
8	Bank Himpunan Saudara 1906	0,02602
9	Bank Internasional Indonesia	-0,01303
10	Bank Kesawan	-0,07004
11	Bank Mandiri	0,08779
12	Bank Mayapada	-0,08001
13	Bank Negara Indonesia	0,03799
14	Bank OCBC NISP	-0,01020
15	Bank Rakyat Indonesia	0,10781
16	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	0,05229
17	Bank Windu Kentjana International	-0,03193

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 2)

TAHUN 2009		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,09920
2	Bank Artha Graha Internasional	-0,03797
3	Bank Bukopin	-0,01175
4	Bank Bumi Artha	-0,03129
5	Bank Capital Indonesia	-0,03830
6	Bank Central Asia	0,04571
7	Bank Danamon Indonesia	-0,05381
8	Bank Ekonomi Raharja	-0,01963
9	Bank ICB Bumiputera	0,00064
10	Bank Kesawan	-0,07112
11	Bank Mandiri	0,12141
12	Bank Mayapada	-0,01275
13	Bank Mega	-0,06705
14	Bank Nusantara Parahyangan	-0,03102
15	Bank OCBC NISP	0,02612
16	Bank Pan Indonesia	-0,07344
17	Bank Permata	0,08841
18	Bank Rakyat Indonesia	0,12149
19	Bank Tabungan Negara	-0,03457
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	-0,02356
21	Bank Victoria International	0,03458
22	Bank Windu Kentjana International	-0,05141

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 2)

TAHUN 2010		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,25951
2	Bank Artha Graha Internasional	0,01565
3	Bank Bukopin	0,04593
4	Bank Bumi Artha	-0,07020
5	Bank Capital Indonesia.	-0,07569
6	Bank Central Asia	0,00170
7	Bank ICB Bumiputera	-0,04090
8	Bank Kesawan	-0,08843
9	Bank Mandiri	0,05994
10	Bank Mayapada	-0,11527
11	Bank Nusantara Parahyangan.	-0,02161
12	Bank Pan Indonesia	-0,01711
13	Bank Sinarmas	0,00962
14	Bank Windu Kentjana International	0,02540
15	BPD Jawa Barat dan Banten	0,01249

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 2)

TAHUN 2011		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Bank Agroniaga	0,07782
2	Bank Artha Graha Internasional	0,05315
3	Bank Bukopin	0,02774
4	Bank Bumi Artha	-0,01013
5	Bank Capital Indonesia	-0,01966
6	Bank CIMB Niaga	0,05426
7	Bank Danamon Indonesia	0,01018
8	Bank Internasional Indonesia	-0,02322
9	Bank Mega	-0,02793
10	Bank Mutiara	-0,03138
11	Bank Nusantara Parahyangan	-0,04997
12	Bank Permata	0,00471
13	Bank QNB Kesawan	-0,02081
14	Bank Sinarmas	-0,03459
15	Bank Tabungan Negara	-0,00488
16	Bank Windu Kentjana International	-0,01299
17	BPD Jawa Barat dan Banten	-0,00149

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 3)

TAHUN 2008		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Affin Syariah Bank	0,24398
2	AMMB Bank	0,06690
3	Hong Leong Bank	0,12643
4	Public Bank	0,11921
5	RHB Capital	0,27626

TAHUN 2009		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Affin Bank	0,09570
2	Affin Syariah Bank	0,03854
3	Bank Islam Malaysia	0,29537
4	RHB Capital	0,14766
5	Hong Leong Bank	0,13358

Lampiran 2

DISCRETIONARY ACCRUALS (HIPOTESIS 3)

TAHUN 2010		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Affin Bank	0,13145
2	Affin Syariah Bank	0,09948
3	Alliance Bank	0,20364
4	AMMB Bank	0,16281
5	Hong Leong Bank	0,11506
6	Public Bank	0,14325
7	RHB Capital	0,19998
8	RHB Islamic Bank	0,24124

TAHUN 2011		
NO	PERUSAHAAN	DA
1	Affin Bank	0,13205
2	Affin Syariah Bank	0,08320
3	Alliance Bank	0,15978
4	Hong Leong Bank	0,13531
5	Public Bank	0,14055
6	RHB Capital	0,17693
7	RHB Islamic Bank	0,17998

Lampiran 3

STATISTIK DESKRIPTIF (HIPOTESIS 1)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA.IND.MAY.SBLM	49	-,10310	,11662	-,0002745	,05844016
DA.IND.MAY.SSUDAH	47	-,13458	,24966	-,0002730	,05747421
Valid N (listwise)	47				

STATISTIK DESKRIPTIF (HIPOTESIS 2)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA.IND.SBLM	39	-,08001	,12149	-,0015026	,05774333
DA.IND.SSUDAH	32	-,11527	,25951	-,0002550	,06431239
Valid N (listwise)	32				

STATISTIK DESKRIPTIF (HIPOTESIS 3)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA.MAY.SBLM	10	,03854	,29537	,1543630	,08804797
DA.MAY.SSUDAH	15	,08320	,24124	,1536473	,04194937
Valid N (listwise)	10				

Lampiran 4

UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>DA.IND</i>	<i>DA.MAY</i>	<i>DA.IND.MAY</i>
N		71	25	96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0009403	,1539336	-,0002738
	Std. Deviation	,06035006	,06272013	,05766356
Most Extreme Differences	Absolute	,110	,140	,129
	Positive	,110	,140	,129
	Negative	-,067	-,078	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,925	,699	1,259
Asymp. Sig. (2-tailed)		,359	,713	,084

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5

UJI BEDA HIPOTESIS 1 (*INDEPENDENT SAMPLE T-TEST*)

Group Statistics

Pre.Post	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA.Ind.May 1	49	-,0002745	,05844016	,00834859
2	47	-,0002730	,05747421	,00838348

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DA.Ind.May	Equal variances assumed	1,170	,282	,000	94	1,000	-,00000151	,01183554
	Equal variances not assumed			,000	93,939	1,000	-,00000151	,01183139

Lampiran 5

UJI BEDA HIPOTESIS 2 (INDEPENDENT SAMPLE T-TEST)

Group Statistics

	Pre.Post	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA.Ind	1	39	-,0015026	,05774333	,00924633
	2	32	-,0002550	,06431239	,01136893

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DA.Ind	Equal variances assumed	,379	,540	-,086	69	,932	-,00124756	,01449775
	Equal variances not assumed			-,085	63,064	,932	-,00124756	,01465426

Lampiran 5

UJI BEDA HIPOTESIS 3 (*INDEPENDENT SAMPLE T-TEST*)

Group Statistics

	Pre.Post	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA.May	1	10	,1543630	,08804797	,02784321
	2	15	,1536473	,04194937	,01083128

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DA.May	Equal variances assumed	6,821	,016	,027	23	,978	,00071567	,02615568
	Equal variances not assumed			,024	11,757	,981	,00071567	,02987576

Lampiran 6

CONTOH LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN SAMPEL INDONESIA

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2010	2009	2008
ASSET				
Kas	2a, 2f	9.521.710	8.367.001	8.300.074
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2f, 2g, 3	24.856.899	18.052.871	13.354.289
Giro pada Bank Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp10.113, Rp25.963 dan Rp27.889 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2f, 2g, 4	2.558.665	7.407.667	7.408.524
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp13.180, Rp14.184 dan Rp260.708 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2h, 3	28.314.030	41.402.410	29.404.815
Elektronik	2b, 2a, 2i, 3, 5			
Pinhak yang mempunyai hubungan istimewa			25.000	
Pinhak ketiga		27.020.730	10.146.414	64.470.950
Dhuwaji		27.309.708	18.108.414	34.571.302
Dhuwaji - Dhuwaji yang belum dilaksanakan, keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian nilai elektronik dan cadangan kerugian penurunan nilai		(117.233)	(110.022)	(63.313)
Utangai Pemerintah	2b, 2j, 7	79.092.734	89.152.040	68.259.029
Tagihan jangka - transaksi perdagangan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.140, Rp144.041 dan Rp1.136.944 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2k, 8	2.073.050	3.140.143	3.013.133
Tagihan atas Elektronik yang dibeli dengan cara Dijual Kembali - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp100, Rp20.460 dan Rp47.007 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2l, 9	8.003.757	4.206.541	410.002
Tagihan Derivatif - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp100, Rp1.365 dan Rp1.3.3 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2m, 10	27.090	174.828	264.021
Kredit yang diberikan	2b, 2n, 2a, 11			
Pinhak yang mempunyai hubungan istimewa				
Pinhak ketiga		799.179	838.027	241.205
Jumlah Kredit yang Diberikan		244.029.034	137.126.220	174.400.404
Dhuwaji - cadangan yang ditanggulangi				(1.004)
Jaminan Kredit yang diberikan setelah penyesuaian yang ditanggulangi		244.029.034	137.126.220	174.400.404
Dhuwaji - Cadangan kerugian penurunan nilai		(11.481.720)	(12.825.020)	(11.800.312)
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih		232.547.314	124.301.200	162.600.092
Platag Pembayaan Konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.004, Rp1.004 dan Rp100 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008	2b, 2n, 12	2.130.813	1.304.064	-

Catatan atas laporan keuangan komprehensif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONGOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

A. Kredit yang diberikan terdiri atas (lanjutan).

b.2. Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas Bank Indonesia:

	31 Desember 2010					Jumlah
	Lancar	Cadangan Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Ditangguhkan	Macet	
Rupiah:						
Modal kerja	34.242.002	3.374.177	319.000	427.737	1.311.198	162.170.272
Investasi	58.278.609	2.183.150	217.849	47.734	474.285	11.589.612
Konsumen	38.529.926	3.067.372	128.120	43.682	432.416	34.901.518
Sindikasi	2.072.177	1.101.195	-	-	-	3.073.372
Karyawan	-195.925	3.159	341	159	5.007	1.222.391
Programs Pemerintah	942.638	24.007	12.503	3.850	8.281	593.795
Jumlah Rupiah	184.093.807	11.753.026	858.673	795.258	2.234.181	313.836.955
Mata uang asing:						
Modal kerja	16.339.400	3.206.394	142.770	23.892	1.057.348	20.769.802
Investasi	16.232.062	1.079.394	412.621	24.201	282.013	18.000.311
Konsumen	73.869	1.176	-	-	-	81.045
Sindikasi	145.690	144.256	-	-	-	289.946
Karyawan	141	-	-	-	33	194
Programs Pemerintah	107.551	-	-	-	-	107.551
Lain-lain	269.169	-	-	-	221.501	490.670
Jumlah mata uang asing	33.193.872	5.031.220	555.391	47.893	1.561.513	40.390.029
Jumlah	217.287.679	16.784.246	1.414.064	773.151	3.795.694	354.226.984
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.190.298)	(4.829.284)	(734.287)	(670.904)	(3.240.542)	(11.484.725)
	219.097.411	11.953.965	639.677	302.348	551.856	242.545.259

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONGOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan).

k. Khisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi sebelum dikurangi pendapatan ditenguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah sebagai berikut (lanjutan):

Jumlah minimum penyisihan kerugian kredit bermasalah sesuai peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	Minimum Penyisihan Kerugian		
	2010	2009	2008
Rupiah:			
Perdagangan, restoran dan hotel	793.989	617.908	606.974
Industri	438.140	566.439	1.008.295
Jasa-jasa dunia usaha	180.118	255.735	170.280
Lain-lain	<u>1.150.851</u>	<u>1.450.480</u>	<u>1.036.822</u>
Jumlah Rupiah	2.563.098	3.890.602	3.381.232
Mata uang asing:			
Perdagangan, restoran dan hotel	763.114	364.394	394.241
Industri	943.402	1.000.702	2.790.243
Jasa-jasa dunia usaha	327.427	255.439	216.639
Lain-lain	<u>259.300</u>	<u>102.096</u>	<u>273.733</u>
Jumlah mata uang asing	1.893.243	2.722.731	3.674.856
	<u>4.456.341</u>	<u>6.613.333</u>	<u>7.056.088</u>

l. Penghapusbukuan Kredit Macet

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Bank Mandiri melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp2.021.053, Rp2.223.520 dan Rp5.507.168 (Bank Mandiri saja). Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

- Facilitas kredit telah digolongkan macet;
- Facilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 100,00% (seratus perseratus) dari pokok kredit macetnya;
- Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil;
- Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar, dan;
- Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*).

Penghapusbukuan kredit macet ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.

m. Kredit yang dihapusbukukan dicatat di extra-comtable. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Kredit extra-comtable ini tidak disajikan dalam neraca. Khisar mutasi kredit extra-comtable untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

	2010	2009	2008
Saldo awal tahun	32.609.917	34.510.621	28.838.375
Penghapusbukuan	2.921.053	2.223.520	5.037.168
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (cash recoveries) dan pencairan kembali (<i>write back</i>) Lain-lain ^{*)}	<u>(2.861.174)</u>	<u>(2.263.736)</u>	<u>(2.918.486)</u>
Saldo akhir tahun	<u>26.827.790</u>	<u>29.023.365</u>	<u>20.882.721</u>

*) Termasuk selisih kurs karena pergerakan mata uang asing.

CONTOH LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN SAMPEL MALAYSIA

Company No. 706506 V

AFFIN Islamic Bank Berhad
(Incorporated in Malaysia)**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
*for the financial year ended 31 December 2009***6 FINANCING, ADVANCES AND OTHER LOANS****(i) By type**

	The Bank/ Economic Entity	
	2009 RM'000	2008 RM'000
Cash line	218,213	93,697
Term financing		
- House financing	2,404,644	2,121,908
Hire purchase receivables	1,050,395	874,759
Syndicated financing	913,988	896,342
Other term financing	818,981	606,786
Bills receivables	7,899	5,275
Trust receipts	77,390	83,763
Claims on customers under acceptance credits	95,431	88,092
Staff financing (of which RM Nil to Directors)	14,524	11,780
Revolving credit	111,112	99,486
	<u>5,712,577</u>	<u>4,982,325</u>
Less: Unearned income	(2,770,908)	(2,488,305)
Gross financing, advances and other loans	<u>2,941,670</u>	<u>2,494,020</u>
Less: Allowance for bad and doubtful financing		
- General	(44,067)	(37,300)
- Specific	(16,804)	(5,780)
Total net financing, advances and other loans	<u>2,880,799</u>	<u>2,450,940</u>

Included in other term financing as at balance sheet date is RM13.5 million (2008: Nil) of term financing entered by the Bank to jointly controlled entity, AFFIN-i Goodyear Sdn Bhd.

(ii) By contract

	The Bank/ Economic Entity	
	2009 RM'000	2008 RM'000
Bai' Bithaman Ajil (deferred payment sale)	1,379,661	1,165,941
AITAB	863,225	712,090
Murabahah (cost plus)	163,884	141,761
Others	84,809	171,236
	<u>2,951,579</u>	<u>2,494,028</u>

Company No: 705206-V

AFFIN Islamic Bank Berhad
(Incorporated in Malaysia)

BALANCE SHEETS as at 31 December 2009

	Nota	The Bank/ Economic Entity	
		2009 RM'000	2008 RM'000
ASSETS			
Cash and short-term funds	3	2,211,477	2,358,150
Available-for-sale securities	4	1,383,903	1,071,326
Held-to-maturity securities	5	575	575
Financing, advances and other loans	6	2,880,708	2,440,639
Other assets	8	34,232	52,585
Tax recoverable		-	5,187
Statutory deposits with Bank Negara Malaysia	9	-	105,400
Investment in jointly controlled entity	10	500	500
Amount due from jointly controlled entity		1,057	750
Property and equipment	11	4,159	3,247
Land held for sale	12	-	15,000
Intangible assets	13	727	1,392
Deferred tax assets	14	8,431	4,552
TOTAL ASSETS		6,515,769	6,069,602
LIABILITIES			
Deposits from customers	15	4,617,330	4,252,119
Deposits and placements of banks and other financial institutions	16	1,238,450	1,761,205
Other liabilities	17	30,951	39,234
Amount due to holding company	18	219,304	254,374
Provision for taxation		1,594	-
TOTAL LIABILITIES		6,117,698	5,805,932
EQUITY			
Share capital	19	260,000	169,000
Reserves	20	138,071	102,671
TOTAL EQUITY		398,071	262,671
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		6,515,769	6,069,602
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES	31	2,157,508	6,994,462

The accounting policies on pages 27 to 44 and the notes on pages 45 to 99 form an integral part of these financial statements.

Company No: 799506-V

AFFIN Islamic Bank Berhad
(Incorporated in Malaysia)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the financial year ended 31 December 2009

7 NON-PERFORMING FINANCING

(i) **Movements in non-performing financing, advances and other loans**

	The Bank/ Economic Entity	
	2009 RM'000	2008 RM'000
Balance at beginning of the financial year	40,101	37,779
Classified as non-performing during the financial year	83,346	61,712
Reclassified as performing during the financial year	(43,446)	(38,442)
Amount recovered	(16,126)	(4,250)
Amount written-off	(3,432)	(16,697)
Balance at end of the financial year	60,456	40,102
Less: Specific allowance	(26,804)	(6,780)
- on non-performing loans	(13,804)	(6,780)
- on performing loans	(13,000)	-
Net non-performing financing, advances and other loans	33,652	33,322
Ratio of net non-performing financing, advances and other loans to gross financing, advances and other loans less specific allowance	1.60%	1.34%
- excluding specific allowance on performing loans	1.15%	1.34%
- including specific allowance on performing loans	1.15%	1.34%

(ii) **Movements in allowance for bad and doubtful debt and financing**

	The Bank/ Economic Entity	
	2009 RM'000	2008 RM'000
General allowance		
Balance at beginning of the financial year	37,305	26,485
Allowance made during the financial year	6,758	10,824
Balance at end of the financial year	44,067	37,309
As % of gross financing, advances and other loans less specific allowance	1.51%	1.50%
Specific allowance		
Balance at beginning of the financial year	6,786	7,170
Allowance made during the financial year	24,935	17,552
Amount recovered	(1,484)	(1,379)
Amount written-off	(3,431)	(16,573)
Balance at end of the financial year	26,804	6,780